

Metode Autentikasi Hadis dalam Tradisi Ulama Klasik dan Kesarjanaan Barat

Irwan Abdurrohman^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: irwanabdurrohman@uinsgd.ac.id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji metode autentikasi hadis dalam dua tradisi keilmuan, yaitu tradisi ulama klasik melalui kerangka *'ulūm al-ḥadīth* dan kesarjanaan Barat melalui pendekatan sejarah kritis (historical-critical method). Kajian ini bertujuan menjelaskan konstruksi metodologis kedua pendekatan, mengidentifikasi problematika epistemologis yang melekat pada masing-masing metode, serta mengevaluasi kelebihan dan keterbatasannya dalam menentukan autentisitas dan historisitas hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif terhadap literatur klasik ilmu hadis serta karya-karya utama kesarjanaan Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode autentikasi dalam tradisi *'ulūm al-ḥadīth* memiliki sistem kritik internal yang sangat sistematis melalui analisis sanad, kredibilitas periwayat, dan kritik matan, tetapi relatif terbatas dalam verifikasi historis eksternal. Sebaliknya, pendekatan sejarah kritis menawarkan perangkat analisis historis yang lebih luas melalui dating, source criticism, common link, dan analisis isnād-cum-matn, meskipun sebagian formulasi klasiknya masih bertumpu pada asumsi metodologis yang diperdebatkan dan kecenderungan melakukan generalisasi dari data yang terbatas. Berdasarkan analisis komparatif tersebut, tulisan ini menawarkan suatu pendekatan integratif yang dibangun di atas prinsip verifikasi ganda (*dual verification*), yaitu penggabungan verifikasi internal melalui perangkat *'ulūm al-ḥadīth* dengan verifikasi eksternal melalui metode sejarah kritis. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan proses autentikasi hadis yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan validitas normatif dan plausibilitas historis dalam satu kerangka penelitian.

Kata Kunci: autentikasi hadis, *'ulūm al-ḥadīth*, kritik sanad, kritik matan, metode sejarah kritis, dating/penanggalan hadis.

Pendahuluan

Sejak masa awal perkembangan Islam, hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an telah menjadi objek perhatian serius para ulama, terutama terkait dengan keautentikannya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa dalam proses transmisinya, hadis tidak hanya terdiri atas riwayat yang autentik, tetapi juga mencakup hadis lemah bahkan palsu. Kesadaran terhadap kondisi ini mendorong lahirnya seperangkat metode kritik yang sistematis dalam tradisi ulama klasik yang kemudian dikenal sebagai *'ulūm al-ḥadīth*.

Metode ini dikembangkan untuk menyeleksi dan mengklasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya melalui analisis sanad, penilaian terhadap periwayat, serta pengujian terhadap matan. Dalam perkembangannya, metode tersebut diterima luas sebagai instrumen utama dalam menentukan autentisitas hadis dalam tradisi keilmuan Islam.

Namun demikian, dalam perkembangan studi Islam modern, khususnya dalam kesarjanaan Barat, metode autentikasi hadis klasik di atas tidak luput dari kritik. Para sarjana Barat, dengan menggunakan pendekatan sejarah kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari *'ulūm al-ḥadīth*, serta mengajukan metode alternatif untuk menilai historisitas hadis.

Dalam konteks ini, kajian terhadap metode autentikasi hadis menjadi penting, tidak hanya untuk mengetahui konstruksi metodologis masing-masing tradisi, tetapi juga untuk memahami kekuatan, keterbatasan, dan kemungkinan integrasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok berikut.

- 1) Bagaimana konstruksi metodologis autentikasi hadis dalam tradisi *'ulūm al-ḥadīth* dan dalam kesarjanaan Barat melalui pendekatan sejarah kritis (*historical-critical method*)?
- 2) Apa kelebihan, keterbatasan, dan problematika epistemologis yang melekat pada masing-masing metode autentikasi hadis tersebut dalam menentukan autentisitas dan historisitas hadis?
- 3) Bagaimana kemungkinan pengembangan pendekatan integratif yang memadukan kekuatan metodologis *'ulūm al-ḥadīth* dengan kritik sejarah modern dalam studi autentikasi hadis?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antara tradisi *'ulūm al-ḥadīth* dan metode sejarah kritis Barat. Sumber utama meliputi karya-karya klasik ilmu hadis serta literatur kesarjanaan Barat seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan Harald Motzki. Analisis difokuskan pada aspek epistemologi, metodologi, dan implikasi hasil kajian.

Metode Autentikasi ‘*Ulūm al-Ḥadīth*

Perkembangan periwayatan hadis pada masa awal Islam tidak dapat dipisahkan dari persoalan autentisitas, terutama karena tradisi periwayatan memuat riwayat dengan tingkat keterpercayaan yang berbeda. Kondisi tersebut mendorong para ulama hadis mengembangkan mekanisme kritik untuk membedakan riwayat yang dapat diterima dari riwayat yang tidak memenuhi persyaratan autentisitas. Upaya sistematisasi metode tersebut berkembang melalui kontribusi sejumlah sarjana Muslim, antara lain al-Shāfi‘ī (w. 204 H) melalui *al-Risālah*, al-Rāmahurmuzī (w. 360 H) melalui *al-Muḥaddith al-Fāsil bayna al-Rāwī wa al-Wā‘ī*, dan al-Ḥākim al-Naysābūrī (w. 405 H) melalui *Ma‘rifat ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Karya-karya tersebut memperlihatkan perkembangan tradisi kritik periwayatan yang kemudian memperoleh bentuk lebih sistematis dalam disiplin ‘*ulūm al-ḥadīth*. Dalam perkembangannya, metode ini menjadi perangkat penting untuk menilai kesinambungan transmisi, kredibilitas periwayat, dan kualitas riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, keandalan metode autentikasi tradisional tetap menjadi objek perdebatan akademik, khususnya mengenai hubungan antara kesahihan sanad dan autentisitas historis suatu hadis (Amin, 2005, hlm. 261–262).

Secara konseptual, ‘*ulūm al-ḥadīth* merupakan disiplin yang membahas prinsip, persyaratan, dan prosedur untuk menilai kualitas periwayatan hadis. Ibn al-Akfānī (w. 749 H), sebagaimana dikutip oleh al-Suyūṭī (1431 H, jil. 1, hlm. 67), mendefinisikan ilmu hadis *dirāyah* sebagai pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, persyaratan, jenis, ketentuan hukum, keadaan para periwayat, serta karakteristik riwayat yang disampaikan. Definisi tersebut memperlihatkan tiga aspek utama kajian, yaitu *al-riwāyah*, *al-ruwāh*, dan *al-marwī*. Aspek pertama berkaitan dengan proses transmisi, termasuk jalur dan metode periwayatan. Aspek kedua berfokus pada identitas, integritas, dan kapasitas intelektual para periwayat. Adapun aspek ketiga menelaah materi riwayat, terutama isi atau *matn* hadis. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam penilaian kualitas hadis, meskipun penerapannya dalam tradisi kritik hadis memiliki penekanan yang tidak selalu seimbang. Dengan demikian, autentikasi hadis secara konseptual tidak hanya berkaitan dengan validitas transmisi, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap informasi yang ditransmisikan.

Dalam kerangka ilmu hadis klasik, hadis sahih ditentukan melalui lima kriteria utama, yaitu kesinambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), integritas moral periwayat (*‘adālat al-ruwāh*), ketelitian dan kekuatan hafalan periwayat (*ḍabṭ al-ruwāh*), ketiadaan kejanggalan (*‘adam al-shudhūdh*), serta ketiadaan cacat tersembunyi (*‘adam al-‘illah*). Kelima kriteria tersebut digunakan untuk menilai apakah suatu riwayat memenuhi persyaratan kesahihan yang telah dirumuskan dalam tradisi keilmuan hadis (al-Ṭaḥḥān, 1996, hlm. 24). Hadis yang memenuhi persyaratan tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih dan termasuk riwayat yang dapat diterima (*maqbūl*). Sebaliknya, riwayat yang tidak memenuhi persyaratan kesahihan memerlukan klasifikasi lebih lanjut berdasarkan jenis dan tingkat kelemahannya. Oleh karena itu, ketidakterpenuhinya satu atau beberapa kriteria hadis sahih tidak selalu berarti bahwa suatu riwayat merupakan hadis palsu, sebab kategori hadis lemah (*ḍa‘īf*) berbeda secara konseptual dari hadis yang terbukti dibuat-buat (*mawḍū‘*). Pembedaan ini penting untuk menjaga ketepatan penilaian dalam kajian autentisitas hadis. Dalam praktiknya, sistem tersebut memberikan kerangka evaluasi yang memungkinkan para ulama mengidentifikasi kualitas riwayat melalui pemeriksaan terhadap sanad, periwayat, dan *matn* secara metodologis.

Meskipun ‘*ulūm al-ḥadīth* memiliki kedudukan penting dalam tradisi keilmuan Islam, sejumlah sarjana mempertanyakan keseimbangan antara kritik sanad dan kritik *matn* dalam penerapannya. Kritik tersebut terutama diarahkan pada kecenderungan sebagian ahli hadis yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kesinambungan transmisi dan kredibilitas periwayat daripada pemeriksaan historis atas kandungan riwayat. Ibn Khaldūn, sebagaimana dibahas oleh Amin (2005, hlm. 262), mengemukakan kritik terhadap kecenderungan penilaian riwayat yang bertumpu pada keterpercayaan pembawa berita. Kritik serupa dikemukakan oleh Aḥmad Amīn dan Maḥmūd Abū Rayyah yang menilai bahwa tradisi kritik hadis lebih menekankan pemeriksaan sanad dibandingkan evaluasi kritis terhadap *matn*. Dari kalangan sarjana Barat, William Muir mempertanyakan kegunaan metode kritik yang terutama berpusat pada sanad, sedangkan Ignaz Goldziher menyoroti keterbatasan perhatian terhadap anakronisme dan persoalan historis dalam kandungan hadis (Brown, 2009, hlm. 205, 210). Akan tetapi, kritik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa para ulama hadis klasik sepenuhnya mengabaikan *matn*. Kritik ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan mengenai proporsi, prosedur, dan efektivitas evaluasi *matn* dalam praktik autentikasi hadis. Dengan demikian, perdebatan akademik tidak hanya menyangkut keberadaan kritik *matn*, tetapi juga sejauh mana kritik tersebut berperan dalam menentukan autentisitas suatu riwayat.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika sejumlah sarjana menemukan riwayat yang dinilai bermasalah dari sudut pandang sejarah meskipun tercantum dalam berbagai koleksi hadis. Permasalahan pertama berkaitan dengan anakronisme, terutama pada riwayat yang mengandung kecenderungan partisan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi setelah masa Nabi dalam bentuk pemberitaan prediktif. Goldziher (1971) dan Schacht (1950) membahas hubungan antara perkembangan hadis dan dinamika politik, teologi, serta hukum dalam sejarah Islam. Sementara itu, Rahman (1994, hlm. 27–82) mengkaji sejumlah hadis prediktif mengenai konflik internal, perpecahan umat, dan perkembangan kelompok-kelompok keagamaan. Permasalahan kedua menyangkut

keberadaan riwayat yang memberikan informasi berbeda mengenai kronologi, tokoh, dan rangkaian peristiwa tertentu. Görke (2011, hlm. 140) menempatkan persoalan semacam ini dalam pembahasan mengenai peluang dan keterbatasan rekonstruksi sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Permasalahan ketiga berkaitan dengan unsur idealisasi dan penggambaran legendaris dalam sebagian tradisi biografis Nabi. Rubin (1998, hlm. xvi) membedakan representasi Nabi yang dibentuk melalui perkembangan tradisi keagamaan dari persoalan rekonstruksi sosok Nabi secara historis. Permasalahan keempat berhubungan dengan keterbatasan pembuktian historis atas hubungan antarmata rantai periwayatan, terutama ketika klaim transmisi tidak memiliki dukungan kesaksian atau bukti independen yang memadai. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan kesahihan berdasarkan kriteria internal tradisi hadis dari derajat kepastian historis yang dapat diperoleh melalui pendekatan sejarah. Namun, keberadaan persoalan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan korpus hadis tidak autentik.

Selain menyangkut penerapannya, metode autentikasi hadis klasik menghadapi persoalan epistemologis mengenai dasar pembentukan dan konsistensi kriteria kesahihan. Persoalan pertama berkaitan dengan landasan yang digunakan para ulama dalam merumuskan lima kriteria hadis sahih. Apakah kriteria tersebut dikembangkan melalui evaluasi terhadap praktik transmisi yang dapat diperiksa secara historis, atau terutama melalui sistematisasi kaidah normatif dalam tradisi keilmuan hadis? Persoalan kedua berkaitan dengan kesinambungan historis penerapan kriteria tersebut, khususnya apakah rumusan yang dikenal dalam literatur ilmu hadis belakangan sepenuhnya identik dengan prosedur yang digunakan para penyusun koleksi hadis generasi awal. Kedua persoalan ini menjadi relevan karena kodifikasi ilmu hadis berlangsung melalui perkembangan intelektual yang panjang. Dalam kajiannya, Amin (2005) mempertanyakan tingkat keandalan metode autentikasi tradisional dan mendorong evaluasi kritis terhadap dasar-dasar epistemologisnya. Oleh karena itu, keberadaan seperangkat kriteria normatif perlu dibedakan dari pembuktian historis mengenai bagaimana kriteria tersebut dirumuskan, diterapkan, dan digunakan untuk menentukan autentisitas riwayat pada periode yang berbeda.

Kritik epistemologis tersebut juga berkaitan dengan distribusi kriteria kesahihan antara sanad dan matn. Tiga kriteria pertama, yaitu kesinambungan sanad, integritas periwayat, dan ketelitian periwayat, secara langsung berhubungan dengan proses transmisi. Sementara itu, dua kriteria lainnya, yakni ketiadaan *shudhūd* dan *'illah*, dapat berkaitan dengan persoalan sanad maupun matn, bergantung pada karakteristik riwayat yang diperiksa. Ismail (1995, hlm. 145, 150) menjelaskan hubungan antara kriteria utama kesahihan sanad dan kaidah-kaidah turunannya, termasuk pemeriksaan terhadap kejanggalan serta cacat tersembunyi. Penekanan terhadap kredibilitas periwayat juga terlihat dalam *al-Risālah*, ketika al-Shāfi'ī (1938, hlm. 370–371) merumuskan persyaratan penerimaan hadis yang mencakup integritas keagamaan, kejujuran, pemahaman terhadap riwayat, ketepatan penyampaian, kekuatan hafalan, kesesuaian dengan periwayat lain, serta ketiadaan praktik *tadlīs*. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa karakter dan kompetensi periwayat memperoleh kedudukan penting dalam menentukan keterpercayaan transmisi. Meskipun demikian, kredibilitas individual periwayat tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap riwayat yang disampaikan terbebas dari kemungkinan kesalahan. Karena itu, diperlukan pembedaan antara penilaian terhadap keterpercayaan seseorang dan verifikasi atas ketepatan informasi yang disampaikan.

Keterbatasan keterpercayaan individual sebagai jaminan akurasi riwayat sebenarnya telah dikenal dalam tradisi kritik hadis klasik. Al-Dhahabī, sebagaimana dikutip oleh Bazmūl (2001, hlm. 192), menegaskan bahwa status *thiqqah* tidak mensyaratkan seseorang sama sekali terbebas dari kesalahan. Ia menyebut Shu'bah dan Mālik sebagai tokoh yang memiliki kredibilitas tinggi, tetapi tetap mungkin melakukan kekeliruan dalam periwayatan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi keilmuan hadis tidak menyamakan integritas periwayat dengan kemustahilan terjadinya kesalahan. Salah satu mekanisme untuk mengidentifikasi persoalan ini ialah pemeriksaan terhadap riwayat *shādh*, yaitu riwayat seorang periwayat terpercaya yang bertentangan dengan riwayat periwayat lain yang memiliki tingkat keterpercayaan lebih tinggi (al-Ṭahhān, 1996, hlm. 24). Dalam pembahasan mengenai penyimpangan dan perbedaan riwayat, literatur ilmu hadis juga mengenal kategori seperti *mudraj*, *maqlūb*, *al-mazīd fī mutṭaṣil al-asānīd*, *muḍṭarib*, dan *muṣaḥḥaf* (al-Ṭahhān, 1996, hlm. 102). Kategori-kategori tersebut memiliki karakteristik dan persyaratan tersendiri sehingga tidak seluruhnya dapat disamakan dengan hadis *shādh*. Keberadaannya justru memperlihatkan bahwa para ulama telah mengembangkan perangkat untuk mendeteksi berbagai bentuk kesalahan transmisi, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh periwayat terpercaya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, metode autentikasi *'ulūm al-ḥadīth* dapat dipahami sebagai sistem kritik yang memiliki perangkat normatif dan prosedural untuk menilai kualitas periwayatan, tetapi masih menyisakan persoalan epistemologis ketika digunakan untuk menetapkan autentisitas historis secara lebih luas. Kritik terhadap dominasi sanad menunjukkan pentingnya evaluasi yang lebih seimbang terhadap jalur periwayatan, karakter periwayat, kandungan matn, serta konteks sejarah kemunculan dan perkembangan suatu riwayat. Namun, kritik tersebut perlu mempertimbangkan bahwa tradisi ilmu hadis klasik juga mengenal pemeriksaan terhadap kejanggalan, cacat tersembunyi, dan pertentangan antarr iwayat. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada ketiadaan mekanisme kritik dalam *'ulūm al-ḥadīth*, melainkan pada sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan dasar pembuktian yang memadai bagi klaim autentisitas historis. Pembedaan antara validitas periwayatan menurut standar ilmu hadis dan autentisitas historis menurut

pendekatan sejarah menjadi landasan penting untuk mengevaluasi keandalan metode autentikasi secara lebih kritis, proporsional, dan metodologis.

Sebagai contoh, hadis *maqlu>b* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " ¹.

Seperti terlihat dalam keterangan pada sumber (aplikasi) yang sama (*Jawa>mi' al-Kalim 4.5*), semua periwayat hadis ini bernilai *thiqqah*, namun dalam hadis itu ada yang terbalik pada lafad yang digarisbawahi. Dalam riwayat Bukha>ri, Tirmidhi>, Nasa>'i>, Ma>lik, Ah}mad, dan yang lainnya,² lafad itu berbunyi:

لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Contoh lainnya adalah hadis *sha>dhdh* berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ " ³. (مسند أحمد بن حنبل)

Hadis riwayat Ah}mad dari Abu>Hurayrah ini berbentuk hadis *qawli>* yang berisi perkataan Nabi berupa perintah untuk berbaring ke sebelah kanan setelah shalat dua rakaat sebelum shalat shubuh. Hadis tersebut berbeda dengan hadis berikut yang berasal dari Abu>Hurayrah juga dan dari 'A<ishah yang keduanya berbentuk *fi'li>*.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَلَاحٍ، كُوفِي، قَالَ: نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْطَجِعُ بَعْدَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَجْلِسُ " (السنن الكبرى للنسائي)⁴
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ " (صحيح البخاري)⁵

Keandalan periwayat merupakan salah satu persoalan epistemologis dalam metode autentikasi hadis klasik. Meskipun seluruh periwayat dalam ketiga hadis yang telah dibahas sebelumnya dinilai *thiqqah*, perbedaan redaksi dan bentuk periwayatan tetap ditemukan serta berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang berbeda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas periwayat tidak secara otomatis menjamin ketepatan setiap informasi yang disampaikan. Persoalan ini semakin kompleks ketika penentuan status *thiqqah* ditelusuri melalui sumber-sumber biografis periwayat (*kutub rijāl al-hadīth*). Penilaian terhadap integritas dan kapasitas periwayat sering kali didasarkan pada informasi yang dihimpun oleh para kritikus hadis dari generasi yang berbeda dengan tokoh yang mereka nilai. Sebagai contoh, Ibn Hajar al-'Asqalānī (773–852 H/1372–1449 M) menyusun sejumlah karya biografis, seperti *al-Iṣṣābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah*, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, dan *Taqrīb al-Tahdhīb*, yang memuat informasi serta penilaian terhadap para periwayat dari generasi awal Islam. Dalam penyusunan karya tersebut, Ibn Hajar memanfaatkan literatur sebelumnya, termasuk *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* karya al-Mizzī (654–742 H/1256–1341 M). Namun, al-Mizzī sendiri hidup beberapa abad setelah sebagian besar periwayat yang dibahasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian biografis berlangsung melalui proses transmisi informasi antargenerasi yang memerlukan pemeriksaan terhadap asal-usul, kesinambungan, dan keterpercayaan sumbernya. Dengan demikian, persoalan epistemologisnya bukan semata-mata terletak pada jarak temporal antara penulis biografi dan periwayat, melainkan pada sejauh mana informasi yang digunakan dapat diverifikasi melalui bukti dan sumber yang independen.

Perdebatan mengenai keandalan sumber biografis tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan antara tradisi kritik hadis klasik dan sebagian kajian historis modern. Dalam tradisi keilmuan hadis, literatur *rijāl al-hadīth* memiliki kedudukan penting sebagai sumber untuk menelusuri identitas, integritas moral, ketelitian, dan hubungan transmisi antarp eriwayat. Sebaliknya, sejumlah sarjana yang menggunakan pendekatan sejarah kritis mempertanyakan kepastian informasi biografis yang dihimpun beberapa generasi setelah kehidupan para periwayat. Amin (2005) mengemukakan bahwa persoalan keandalan informasi biografis menjadi salah satu titik kritis dalam mengevaluasi autentisitas hadis berdasarkan metode tradisional. Kritik ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa suatu penilaian terhadap kredibilitas periwayat didasarkan pada informasi yang validitasnya sendiri masih memerlukan pembuktian. Apabila sumber yang digunakan untuk menetapkan keterpercayaan periwayat hanya memperoleh legitimasi dari jaringan otoritas yang sama tanpa verifikasi tambahan, penalaran

¹ Muslim b. al-H{ajja>j, "S{ah}i>h Muslim," kitab al-Zaka>h, bab Fad{l Ikhfa>' al-S}adaqah, nomor 1718, dalam aplikasi hadis *Jawa>mi' Al-Kalim 4.5* (islamweb.net, n.d.).

² Lihat kolom تخریج untuk hadis di atas pada aplikasi yang sama (*Jawa>mi' Al-Kalim 4.5*)

³ Ah}mad b. H{anbal, "Musnad Ah}mad B. H{anbal," bab *Musnad Abi> Hurairah*, nomor 9163, dalam aplikasi program hadis *Jawa>mi' Al-Kalim 4.5* (islamweb.net, n.d.).

⁴ Ah}mad b. Shu'ayb al-Nasa>'i>, "Al-Sunan Al-Kubra> Li Al-Nasa>'i>," kitab *qiya>m al-layl wa tat{jawwu' al-naha>r*, bab *al-qu' u>d ba'da al-id{t}ija>*, nomor 1438, dalam aplikasi program hadis *Jawa>mi' Al-Kalim 4.5* (islamweb.net, n.d.).

⁵ Muh}ammad b. Isma>'i> Al-Bukha>ri>, "S{ah}i>h Al-Bukha>ri>," kitab *al-jumu'ah*, bab *al-d{aj'ah 'ala> al-shiqq al-ayman ba'da rak'atay al-fajr*, nomor 1097, dalam aplikasi program hadis *Jawa>mi' Al-Kalim 4.5* (islamweb.net, n.d.).

tersebut berisiko menghadapi persoalan pembuktian sirkular. Akan tetapi, penggunaan informasi dari generasi sebelumnya tidak dengan sendirinya membentuk argumen sirkular, sebab keandalan suatu sumber tetap dapat diperiksa melalui perbandingan riwayat, kronologi, konsistensi informasi, dan bukti pendukung lainnya. Oleh karena itu, kritik terhadap *rijāl al-ḥadīth* lebih tepat diarahkan pada transparansi dan kekuatan prosedur verifikasi historis, bukan pada penolakan menyeluruh terhadap nilai informatif literatur biografis.

Persoalan epistemologis berikutnya berkaitan dengan konsistensi penerapan kriteria autentikasi hadis dalam literatur periwayatan. Amin (2005) mempertanyakan kesesuaian antara kaidah kritik hadis yang telah disistematisasikan dan praktik penghimpunan riwayat dalam koleksi hadis klasik. Salah satu persoalan yang dibahas ialah kedudukan riwayat seorang *mudallis*, yaitu periwayat yang dalam kondisi tertentu menggunakan bentuk penyampaian yang tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan langsung dari sumbernya. Dalam kaidah kritik hadis, riwayat seorang periwayat yang dikenal melakukan *tadlīs* memerlukan pemeriksaan khusus apabila disampaikan melalui ungkapan ambigu, seperti *'an* (عن), yang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa periwayat mendengar hadis secara langsung dari informannya. Sebaliknya, ungkapan seperti *ḥaddathanā* (حدثنا) memberikan indikasi yang lebih eksplisit mengenai bentuk penerimaan hadis. Namun, penilaian terhadap riwayat *mu'an'an* tidak dapat dilepaskan dari tingkat *tadlīs* periwayat, kemungkinan pertemuan antarpriwayat, jalur transmisi lainnya, serta bukti pendukung yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan bentuk periwayatan ambigu tidak secara otomatis membuktikan ketidakautentikan hadis. Persoalan yang perlu diuji ialah apakah penerapan persyaratan penerimaan langsung secara ketat dan konsisten akan menghasilkan penilaian berbeda terhadap sejumlah hadis yang telah diterima dalam koleksi-koleksi utama.

Amin (2005) membahas persoalan tersebut melalui kasus Abū al-Zubayr, seorang periwayat dari generasi tabi'in yang oleh sebagian kritikus hadis dikategorikan sebagai *mudallis*. Berdasarkan data yang dikemukakan dalam kajian tersebut, Abū al-Zubayr meriwayatkan sebanyak 921 hadis, termasuk 158 pengulangan, yang tersebar dalam berbagai koleksi hadis. Dalam *al-Kutub al-Sittah*, terdapat 360 hadis yang diriwayatkannya dari Jābir ibn 'Abd Allāh, sedangkan 194 di antaranya tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dari 194 riwayat tersebut, sebanyak 125 menggunakan bentuk transmisi ambigu, seperti *'an* (عن), sementara 69 lainnya menggunakan ungkapan yang menunjukkan penerimaan secara lebih eksplisit, seperti *ḥaddathanā* (حدثنا). Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar riwayat Abū al-Zubayr dari Jābir yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* menggunakan bentuk periwayatan yang tidak secara langsung memastikan hubungan transmisi melalui pendengaran. Apabila seluruh riwayat *mu'an'an* dari periwayat yang dinilai melakukan *tadlīs* ditolak tanpa mempertimbangkan bukti pendukung, sejumlah hadis dalam koleksi tersebut berpotensi menghadapi persoalan penerimaan berdasarkan penerapan kaidah yang sangat ketat. Namun, kesimpulan tersebut tetap bersifat kondisional karena status autentisitas setiap riwayat memerlukan pemeriksaan terhadap keseluruhan sanad, keberadaan jalur pendukung, serta pertimbangan khusus para kritikus hadis. Kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjelaskan hubungan antara perumusan kaidah normatif dan praktik penerapannya dalam penyeleksian hadis, bukan membuktikan bahwa seluruh riwayat yang menggunakan bentuk *'an'anaḥ* harus ditolak.

Persoalan serupa muncul dalam periwayatan al-Ḥasan al-Baṣrī (w. 110 H), seorang tokoh tabi'in yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga dikategorikan sebagai *mudallis* oleh sejumlah kritikus hadis. Berdasarkan data yang dibahas Amin (2005), al-Ḥasan al-Baṣrī meriwayatkan sekurang-kurangnya 281 hadis dalam *al-Kutub al-Sittah*, dengan 43 riwayat tercantum dalam *al-Ṣaḥīḥayn*, yaitu 31 dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan 12 dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dari 31 riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, delapan menggunakan ungkapan yang menunjukkan penerimaan langsung, 17 menggunakan bentuk *'an'anaḥ*, dan enam lainnya dikategorikan sebagai riwayat *mursal*. Sementara itu, dari 12 riwayat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dua menggunakan bentuk periwayatan eksplisit, delapan menggunakan *'an'anaḥ*, dan dua lainnya merupakan riwayat *mursal*. Data tersebut memperlihatkan adanya variasi bentuk transmisi dalam riwayat yang dinisbatkan kepada seorang periwayat yang mendapat penilaian berbeda mengenai praktik *tadlīs*. Apabila persyaratan penerimaan langsung diterapkan tanpa pengecualian atau pertimbangan terhadap bukti pendukung, sebanyak 17 riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan delapan riwayat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* berpotensi memerlukan evaluasi ulang. Akan tetapi, kemungkinan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan penolakan terhadap keseluruhan hadis yang bersangkutan. Penilaian akhirnya tetap bergantung pada pemeriksaan hubungan antarpriwayat, klasifikasi *tadlīs*, serta jalur transmisi lain yang mungkin memperkuat autentisitas riwayat. Dengan demikian, kasus al-Ḥasan al-Baṣrī memperkuat pertanyaan mengenai konsistensi penggunaan kaidah kritik sanad, terutama ketika kaidah yang dirumuskan secara normatif dihadapkan pada keragaman praktik periwayatan dalam literatur hadis.

Kesenjangan antara rumusan kaidah autentikasi dan praktik seleksi hadis tersebut dapat ditinjau melalui perkembangan historis kodifikasi *'ulūm al-ḥadīth*. Penghimpunan sejumlah koleksi hadis utama berlangsung terutama pada abad ketiga Hijriah, sebagaimana terlihat dalam karya al-Bukhārī (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H). Sementara itu, sistematisasi ilmu hadis terus berkembang pada periode berikutnya, termasuk melalui *al-Muḥaddith al-Fāṣil bayna al-Rāwī wa al-Wā'ī* karya al-Ramahurmuzī (w. 360 H) dan karya-karya ulama sesudahnya. Rumusan lima kriteria kesahihan yang dikenal dalam literatur ilmu hadis memperoleh bentuk sistematis yang semakin berpengaruh melalui perkembangan kajian hadis hingga masa Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H).

Namun, perkembangan tersebut tidak berarti bahwa para penghimpun hadis abad ketiga belum memiliki standar kritik atau bahwa seluruh kriteria kesahihan baru ditemukan setelah penyusunan koleksi hadis. Al-Shāfi‘ī (1938, hlm. 370–371), misalnya, telah merumuskan sejumlah persyaratan penerimaan riwayat yang berkaitan dengan integritas, ketelitian, dan metode transmisi periwayat. Persoalan yang lebih relevan ialah sejauh mana rumusan sistematis yang berkembang kemudian merepresentasikan, menjelaskan, atau memperluas praktik kritik yang telah diterapkan oleh para penghimpun hadis sebelumnya. Dalam konteks ini, perbedaan penafsiran terhadap istilah dan persyaratan periwayatan dapat mencerminkan perkembangan konseptual dalam disiplin ilmu hadis, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya inkonsistensi metodologis. Pembuktian atas kesenjangan tersebut memerlukan perbandingan historis yang cermat antara praktik autentikasi para penghimpun hadis dan konstruksi kaidah yang dirumuskan oleh generasi berikutnya.

Selain persoalan kredibilitas periwayat dan konsistensi metodologis, kritik epistemologis terhadap *‘ulūm al-ḥadīth* juga menyangkut prinsip keadilan seluruh sahabat (*al-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*). Dalam tradisi ilmu hadis Sunni, prinsip ini menempatkan para sahabat Nabi sebagai generasi periwayat yang secara umum diterima integritasnya sehingga pemeriksaan *jarḥ wa ta’dīl* terhadap mereka tidak diterapkan dengan cara yang sama seperti terhadap generasi berikutnya. Namun, dari perspektif sejarah kritis, prinsip tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara penetapan status normatif dan penilaian terhadap tindakan individu berdasarkan laporan historis. Sejumlah sumber sejarah dan literatur biografis memuat riwayat tentang tindakan sebagian tokoh yang dipandang sebagai sahabat, termasuk kisah Bujayr ibn ‘Abd Allāh ibn Sha‘b yang dikaitkan dengan pencurian barang milik Nabi, laporan mengenai al-Walīd ibn ‘Uqbah yang dikaitkan dengan persoalan ketidakjujuran dan pelanggaran hukum, serta riwayat mengenai al-Ash‘ath ibn Qays yang pernah meninggalkan Islam sebelum kembali memeluknya. Selain itu, sejarah awal Islam mencatat konflik politik setelah terbunuhnya Khalifah ‘Uthmān ibn ‘Affān, termasuk keterlibatan sejumlah tokoh utama dalam peristiwa yang dikenal sebagai *al-fitnah al-kubrā*. Akan tetapi, laporan-laporan tersebut memiliki konteks, karakter transmisi, dan status autentisitas yang berbeda sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa prinsip keadilan sahabat secara keseluruhan tidak memiliki dasar. Sebaliknya, keberadaan laporan tersebut membuka ruang bagi pemeriksaan kritis mengenai bagaimana konsep *‘adālah* didefinisikan, bagaimana status sahabat ditetapkan, dan sejauh mana penilaian normatif dapat dipertemukan dengan bukti sejarah tentang tindakan individu. Dengan demikian, persoalan epistemologis yang muncul bukan sekadar apakah para sahabat pernah melakukan kesalahan, melainkan bagaimana tradisi kritik hadis membedakan kedudukan normatif mereka dari penilaian terhadap integritas dan akurasi periwayatan secara historis.

Metode Autentikasi dalam Studi Hadis di Barat

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa metode autentikasi *‘ulūm al-ḥadīth* menghadapi sejumlah persoalan epistemologis, terutama yang berkaitan dengan keandalan informasi periwayatan, konsistensi penerapan kriteria kesahihan, dan pembuktian historis terhadap suatu hadis. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan studi hadis di kalangan sarjana Barat yang menggunakan pendekatan sejarah kritis (*historical-critical approach*) untuk meneliti asal-usul, proses transmisi, dan autentisitas historis hadis. Pendekatan ini menempatkan hadis sebagai sumber sejarah yang perlu diperiksa secara kritis, bukan semata-mata sebagai riwayat yang telah memperoleh otoritas dalam tradisi keagamaan. Juynboll (1983) mengembangkan kajian hadis melalui persoalan kronologi, asal-usul, dan atribusi periwayatan, sedangkan Motzki (2005) menekankan pentingnya metode penanggalan (*dating*) untuk menelusuri periode kemunculan dan perkembangan suatu riwayat. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara pendekatan sejarah kritis yang berupaya merekonstruksi perkembangan historis hadis dan ilmu hadis klasik yang juga bertujuan menentukan kelayakan suatu riwayat sebagai sumber ajaran agama. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, kedua pendekatan tersebut sama-sama menempatkan pemeriksaan sumber dan transmisi sebagai persoalan penting dalam penilaian keandalan hadis.

Dalam metodologi sejarah, pemeriksaan terhadap keandalan sumber dilakukan melalui kritik sumber (*source criticism*) yang secara umum mencakup kritik eksternal (*external criticism*) dan kritik internal (*internal criticism*). Kritik eksternal bertujuan memeriksa autentisitas sumber berdasarkan karakteristik material, asal-usul, waktu penyusunan, atribusi kepengarangan, dan keutuhan dokumen. Sementara itu, kritik internal berfokus pada kredibilitas informasi yang terkandung dalam sumber, termasuk konsistensi isi, kedudukan penulis atau pemberi informasi, serta kesesuaiannya dengan bukti sejarah lainnya. Perbedaan tersebut memberikan kerangka dasar untuk menilai apakah suatu sumber benar-benar berasal dari periode dan lingkungan yang diklaim serta sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Dalam studi hadis, pemeriksaan semacam ini perlu memperhatikan karakteristik khusus tradisi periwayatan yang melibatkan hubungan antara teks hadis (*matn*), jalur transmisi (*isnād*), dan proses penghimpunan riwayat ke dalam berbagai koleksi. Oleh karena itu, penerapan kritik sejarah terhadap hadis tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan isi maupun atribusi sumber secara terpisah, tetapi memerlukan analisis terhadap hubungan antara bukti tekstual, jaringan periwayatan, dan konteks historisnya.

Penerapan pendekatan sejarah kritis dalam studi hadis berkembang melalui kajian yang berusaha menentukan waktu kemunculan, lingkungan asal, dan pihak yang dapat dihubungkan dengan pembentukan suatu riwayat. Juynboll (1983, hlm. 7) merumuskan orientasi kajian tersebut melalui tiga persoalan utama, yaitu kronologi (*chronology*), asal-usul atau lingkungan kemunculan (*provenance*), dan kepengarangan atau atribusi (*authorship*). Ketiga persoalan tersebut berkaitan dengan upaya mengidentifikasi kapan suatu hadis mulai beredar, dalam lingkungan historis seperti apa riwayat tersebut berkembang, dan kepada siapa suatu riwayat dapat diatribusikan berdasarkan bukti yang tersedia. Sementara itu, Motzki (2005, hlm. 205) menempatkan penanggalan sumber sebagai tahap penting dalam menentukan nilai historis suatu riwayat. Menurutnya, pemeriksaan terhadap jarak temporal dan geografis antara sumber dengan peristiwa yang dilaporkan diperlukan untuk menilai sejauh mana sumber tersebut dapat digunakan dalam rekonstruksi sejarah. Dengan demikian, penanggalan hadis tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu penyusunan kitab koleksi, tetapi juga mencakup penelusuran perkembangan riwayat sebelum mencapai bentuk tekstual yang terdokumentasikan. Kendati demikian, penetapan waktu kemunculan suatu riwayat tidak secara otomatis membuktikan kebenaran seluruh informasi yang terkandung di dalamnya. Penanggalan lebih tepat dipahami sebagai tahap penting dalam evaluasi historis yang perlu dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap transmisi, isi, dan bukti pendukung lainnya.

Perkembangan metodologi penanggalan hadis dalam kesjaranaan Barat dipetakan secara sistematis oleh Motzki (2005) melalui artikelnya yang berjudul *Dating Muslim Traditions: A Survey*. Motzki mengidentifikasi empat pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan periode kemunculan dan perkembangan hadis. Pertama, penanggalan berdasarkan matn (*dating on the basis of the matn*), yaitu pendekatan yang menelaah kandungan, karakteristik, dan petunjuk historis dalam teks hadis. Kedua, penanggalan berdasarkan kemunculan riwayat dalam koleksi hadis (*dating on the basis of the occurrence of traditions in collections*), yang menggunakan keberadaan atau ketiadaan riwayat dalam sumber tertulis sebagai bagian dari dasar penentuan kronologi. Ketiga, penanggalan berdasarkan sanad (*dating on the basis of the isnād*), yaitu pendekatan yang menganalisis struktur dan hubungan antarmata rantai periwayatan untuk menelusuri perkembangan transmisi hadis. Keempat, penanggalan berdasarkan kombinasi sanad dan matn (*dating with isnād and matn*), yang menghubungkan analisis jalur transmisi dengan perbandingan variasi teks untuk mengidentifikasi pola perkembangan riwayat (Motzki, 2005, hlm. 205–253). Keempat pendekatan tersebut menunjukkan bahwa studi autentisitas hadis dalam kesjaranaan Barat tidak berkembang melalui satu metode yang seragam, melainkan melalui sejumlah perangkat analisis dengan dasar pembuktian dan keterbatasan yang berbeda. Dalam karya-karyanya, Motzki juga memperlihatkan pentingnya pemeriksaan hubungan antara sanad dan matn untuk menilai perkembangan historis riwayat, sebagaimana tercermin dalam kajiannya mengenai hadis dalam *al-Muwatta'* dan laporan sejarah tentang pembunuhan Ibn Abī al-Ḥuqayq (Motzki, 1998, 2000). Dengan demikian, perkembangan metode *dating* memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi historisitas hadis melalui keterkaitan antara bukti tekstual, struktur transmisi, dan konteks sejarah, tanpa menganggap hasil penanggalan sebagai jaminan mutlak autentisitas suatu riwayat.

1. Penanggalan Berbasis Matan

Penanggalan hadis berbasis matan dikembangkan antara lain oleh Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan Marston Speight. Metode penanggalan Goldziher terdiri atas dua tipe, yaitu penanggalan hadis secara umum (*general dating of ḥadīth*) dan penanggalan hadis tertentu (*dating of a particular ḥadīth*). Prinsip penanggalan umum yang ditetapkan Goldziher menyatakan bahwa sebagian besar hadis yang terdapat dalam kitab-kitab koleksi kanonik merupakan hasil perkembangan keagamaan, sejarah, dan sosial Islam selama dua abad pertama, yang merefleksikan berbagai kecenderungan dalam masyarakat Islam selama tahap-tahap perkembangan dan kematangannya (Motzki, 2005, hlm. 206). Sementara itu, untuk penanggalan hadis tertentu, Goldziher menggunakan beberapa prinsip metodologis. Pertama, anakronisme menunjukkan bahwa sebuah teks berasal dari periode yang lebih belakangan daripada waktu yang diklaim. Kedua, hadis yang kandungannya secara jelas mencerminkan tahap perkembangan lebih lanjut dari suatu persoalan dianggap lebih muda dibandingkan hadis yang kandungannya menunjukkan tahap perkembangan lebih awal (*less developed content*). Ketiga, hadis yang menggambarkan Nabi dan kaum Muslim awal secara kurang menguntungkan (*in an unfavourable light*) dapat dipandang sebagai riwayat autentik yang berasal dari periode awal (*early*). Keempat, tuduhan timbal balik di antara pihak-pihak yang saling bertentangan dimungkinkan memiliki inti historis (*historical kernel*) (Motzki, 2004, hlm. xlv; 2005, hlm. 210).

Selain Goldziher, pendukung utama metode penanggalan (*dating*) berbasis matan adalah Joseph Schacht. Namun, berbeda dengan Goldziher, metode penanggalan yang dikembangkan Schacht tidak hanya didasarkan pada matan, tetapi merupakan kombinasi beberapa pendekatan, yaitu (1) rekonstruksi hipotetis perkembangan teori hukum selama abad kedua Hijriah; (2) penanggalan hadis berdasarkan koleksi tempat hadis tersebut pertama kali muncul; (3) perbandingan matan hadis tertentu; dan (4) perbandingan sanad. Dengan demikian, penanggalan berdasarkan matan dilakukan setelah pendekatan-pendekatan lainnya digunakan. Dalam melakukan penanggalan berbasis matan, Schacht bertolak dari beberapa premis dan asumsi. Pertama, penanggalan suatu hadis harus

dilakukan dengan menempatkan kandungannya dalam perkembangan hukum sebagaimana telah direkonstruksi oleh Schacht. Kedua, hadis yang berbentuk kaidah hukum singkat (*legal maxim*) dianggap lebih tua daripada hadis yang berbentuk narasi. Ketiga, hadis yang menggunakan ungkapan anonim dianggap lebih tua daripada hadis yang disandarkan kepada otoritas tertentu. Keempat, hadis dengan redaksi yang lebih pendek dianggap lebih tua daripada hadis yang memiliki uraian lebih terperinci. Kelima, teks hadis yang memuat suatu persoalan secara implisit dianggap lebih tua daripada teks yang menjelaskannya secara eksplisit (Motzki, 2004, hlm. xlv; 2005, hlm. 211).

Sementara itu, Marston Speight menggunakan analisis bentuk (*form analysis*) dalam penanggalan hadis berbasis matan. Metode ini berasal dari tradisi kajian Injil yang mulai diterapkan dalam studi Islam pada tahun 1970-an. Dalam artikelnya yang berjudul *The Will of Sa'd b. a. Waqqas: The Growth of a Tradition*, Speight berupaya merekonstruksi perkembangan kronologis sebuah hadis Nabi dengan membandingkan berbagai varian matannya. Sebagaimana dijelaskan Motzki (2004, hlm. xlvi), Speight bertolak dari asumsi bahwa seluruh varian tekstual telah menjadi bagian dari tradisi lisan sebelum dibakukan dalam kompilasi tertulis (*all textual variants had been part of an oral tradition before they became frozen in a written compilation*). Speight juga menggunakan sejumlah premis yang serupa dengan Schacht untuk mengidentifikasi bentuk teks yang lebih awal (*early*) dan lebih belakangan (*later*). Metodanya mencakup beberapa tahapan. Pertama, Speight menyusun korpus yang terdiri atas 19 hadis yang dianggap memiliki keterkaitan berdasarkan kandungannya. Kedua, teks-teks tersebut disusun berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Ketiga, setiap teks dianalisis berdasarkan tingkat perkembangannya, kohesi internal unsur-unsurnya, serta karakteristik gaya bahasa dan kosakata yang dapat menunjukkan tahap awal atau tahap berikutnya dalam perkembangan teks. Keempat, teks-teks tersebut diklasifikasikan berdasarkan keterkaitan kandungannya. Melalui tahapan tersebut, Speight berupaya menetapkan kronologi perkembangan hadis yang diteliti (Motzki, 2005, hlm. 212).

Metode penanggalan berbasis matan yang digunakan Goldziher, Schacht, dan Speight mendapat kritik dari Motzki. Menurut Motzki (2004, hlm. xlvii), sebagian besar prinsip dan premis yang digunakan ketiga sarjana tersebut belum memiliki landasan yang cukup memadai untuk menghasilkan kesimpulan penanggalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Validitas sejumlah asumsi metodologisnya juga masih dapat dipersoalkan, sementara sebagian kesimpulan yang dihasilkan mengandung kecenderungan penalaran sirkular (*circular reasoning*). Meskipun penanggalan relatif melalui analisis matan dimungkinkan untuk kasus-kasus tertentu, metode tersebut umumnya hanya menghasilkan perkiraan kronologis yang bersifat terbatas. Oleh karena itu, Motzki mempertanyakan kemungkinan menentukan waktu kemunculan suatu hadis secara tepat apabila analisis hanya didasarkan pada matan tanpa mempertimbangkan bukti periwayatan dan sumber historis lainnya.

2. Penanggalan Berbasis Kitab Koleksi Hadis

Metode penanggalan hadis kedua didasarkan pada kemunculan suatu riwayat dalam kitab-kitab koleksi hadis. Pendekatan ini bertujuan menelusuri asal-usul hadis dengan mengidentifikasi sumber tertulis paling awal yang memuat riwayat tersebut. Joseph Schacht dan G. H. A. Juynboll merupakan dua sarjana yang mengembangkan penggunaan pendekatan ini dalam studi hadis. Secara metodologis, keberadaan suatu hadis dalam sumber tertulis paling awal menunjukkan batas waktu terakhir yang memungkinkan hadis tersebut telah beredar (*terminus ante quem*). Artinya, hadis itu sekurang-kurangnya telah dikenal ketika sumber yang memuatnya disusun. Namun, Schacht dan Juynboll mengembangkan asumsi lebih jauh dengan menggunakan prinsip *terminus post quem*, yaitu anggapan bahwa suatu hadis tidak mungkin muncul sebelum sumber tertulis paling awal yang memuatnya. Dalam kerangka tersebut, koleksi hadis yang pertama kali mencantumkan suatu riwayat dipandang sebagai lingkungan awal pembentukan atau penyebaran riwayat yang bersangkutan. Dengan demikian, penanggalan tidak hanya digunakan untuk menentukan batas waktu keberadaan hadis yang dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis, tetapi juga untuk memperkirakan periode awal kemunculannya. Perbedaan antara kedua prinsip tersebut menjadi persoalan metodologis karena keberadaan suatu riwayat dalam sumber tertentu dapat membuktikan bahwa riwayat tersebut telah dikenal pada masa penyusunan sumber, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa riwayat itu belum beredar sebelumnya (Motzki, 2005).

Asumsi mengenai ketidakberadaan hadis sebelum kemunculannya dalam sumber tertulis didukung oleh penggunaan prinsip *argumentum e silentio* atau argumen berdasarkan ketiadaan penyebutan. Schacht menggunakan prinsip tersebut secara sistematis untuk menilai apakah suatu hadis telah dikenal pada periode tertentu. Menurut pendekatan ini, apabila sebuah hadis tidak ditemukan atau tidak digunakan dalam pembahasan hukum yang semestinya memerlukan riwayat tersebut sebagai dasar argumentasi, ketiadaan penggunaannya dapat dipandang sebagai indikasi bahwa hadis itu belum dikenal ketika pembahasan berlangsung. Schacht dengan demikian menghubungkan kemunculan hadis dengan perkembangan perdebatan hukum dalam masyarakat Islam awal. Akan tetapi, Motzki (2005) mengidentifikasi kelemahan pendekatan tersebut pada tataran teoretis dan praktis. Secara teoretis, tidak digunakannya suatu hadis tidak selalu membuktikan ketidakberadaannya karena seseorang mungkin belum mengetahui riwayat tersebut, tidak memiliki akses terhadapnya, atau memilih tidak menggunakannya. Secara praktis, karakter dan tujuan penyusunan sumber tertulis juga perlu diperhatikan. Suatu

koleksi hadis belum tentu disusun untuk menghimpun seluruh argumen yang tersedia dalam perdebatan hukum, tetapi mungkin mencerminkan pilihan materi berdasarkan kepentingan, pengetahuan, dan orientasi penyusunnya. Oleh karena itu, ketiadaan hadis dalam suatu koleksi tidak cukup untuk menetapkan bahwa riwayat tersebut belum ada pada periode sebelumnya tanpa mempertimbangkan konteks penyusunan dan fungsi sumber yang diperiksa.

Juynboll mengembangkan penggunaan *argumentum e silentio* dengan memperluas penerapannya terhadap koleksi hadis yang tidak terbatas pada bidang hukum. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa para penghimpun hadis Muslim pada umumnya memasukkan materi periwayatan yang telah mereka peroleh dari generasi sebelumnya ke dalam koleksi masing-masing. Berdasarkan asumsi tersebut, suatu kitab koleksi dipandang sebagai representasi yang relatif lengkap mengenai riwayat yang tersedia dalam lingkungan geografis dan intelektual tertentu pada masa penyusunannya. Apabila suatu hadis tidak ditemukan dalam koleksi yang secara metodologis diperkirakan semestinya memuatnya, ketidakhadiran tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan bahwa hadis itu baru muncul pada periode berikutnya. Dengan demikian, Juynboll dan Schacht sama-sama menggunakan kemunculan tertulis paling awal sebagai indikator penting dalam penentuan kronologi hadis, meskipun cakupan sumber dan penerapan argumentasinya memiliki perbedaan (Juynboll, 1983; Motzki, 2005). Namun, pendekatan ini menghadapi keberatan metodologis karena kelengkapan koleksi hadis awal tidak dapat diasumsikan tanpa pembuktian. Keterbatasan sumber yang masih tersedia, kemungkinan hilangnya sebagian materi periwayatan, serta proses seleksi yang dilakukan para penghimpun menjadi faktor yang membatasi kekuatan kesimpulan berdasarkan ketiadaan penyebutan. Oleh karena itu, metode penanggalan berbasis kitab koleksi dapat memberikan petunjuk kronologis mengenai keberadaan suatu riwayat dalam sumber tertulis, tetapi penentuan waktu awal kemunculannya tetap memerlukan bukti historis tambahan.

3. Penanggalan Berbasis Sanad

Metode penanggalan hadis ketiga menggunakan sanad (*isnād*) sebagai dasar untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan historis suatu riwayat. Kajian sanad telah lama menjadi bagian penting dalam tradisi ilmu hadis Islam, terutama untuk menilai kesinambungan transmisi, integritas dan ketelitian periwayatan, serta kemungkinan terdapatnya kejanggalan (*shudhūdh*) dan cacat tersembunyi (*'illah*). Dalam kajian hadis yang menggunakan pendekatan sejarah kritis, perhatian terhadap sanad diarahkan pada persoalan yang berbeda, yaitu sejauh mana struktur transmisi dapat digunakan sebagai bukti untuk menentukan periode kemunculan dan perkembangan suatu hadis. Dengan demikian, sanad tidak hanya diperlakukan sebagai perangkat untuk mengukur kualitas periwayatan berdasarkan kaidah ilmu hadis, tetapi juga sebagai sumber informasi historis mengenai hubungan antargenerasi periwayatan. Motzki (2005) membedakan penanggalan berbasis sanad menjadi dua pendekatan utama. Pertama, analisis sanad terhadap satu hadis atau sekelompok riwayat yang berkaitan (*isnād analysis of a single tradition*), yang bertujuan menentukan kronologi riwayat melalui perbandingan berbagai jalur transmisinya. Kedua, rekonstruksi sumber berdasarkan sanad (*source reconstruction on the basis of isnāds*), yang bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber terdahulu yang digunakan seorang penghimpun hadis berdasarkan pola penyandaran riwayat. Pendekatan pertama terutama dikembangkan oleh Schacht dan Juynboll, sedangkan pendekatan kedua dikembangkan antara lain oleh Fuat Sezgin dan Harald Motzki.

Joseph Schacht memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan analisis sanad sebagai metode penanggalan hadis melalui konsep *common link*, yaitu periwayatan yang menjadi titik pertemuan sejumlah jalur transmisi suatu hadis. Schacht mengajukan lima kaidah utama untuk memperkirakan kronologi riwayat berdasarkan struktur sanad. Pertama, sanad yang lebih lengkap dan berkembang dianggap muncul pada periode yang lebih belakangan. Kedua, apabila terdapat satu jalur yang berhenti pada otoritas lebih rendah, seperti tabiin, dan jalur lain yang mencapai otoritas lebih tinggi, jalur kedua dipandang sebagai perkembangan sekunder melalui proses *backwards growth of isnād*. Ketiga, penambahan jalur periwayatan atau otoritas baru dalam sumber yang lebih belakangan dipandang sebagai hasil proses *spread of isnād*. Keempat, keberadaan *common link* yang menonjol dalam sebagian besar jalur suatu hadis dianggap sebagai petunjuk bahwa riwayat tersebut berasal dari periode kehidupan tokoh tersebut. Kelima, jalur sanad yang melewati *common link* dipandang sebagai perkembangan yang muncul kemudian. Kelima kaidah tersebut digunakan Schacht untuk menjelaskan proses pertumbuhan sanad dan memperkirakan waktu kemunculan hadis berdasarkan struktur transmisinya (Motzki, 2005).

Namun, Motzki (2005) mempertanyakan penerapan kelima kaidah Schacht sebagai prinsip yang berlaku secara umum. Menurutnya, keberadaan sanad yang lengkap tidak selalu menunjukkan bahwa suatu riwayat muncul lebih belakangan, karena sanad yang relatif awal juga dapat memiliki struktur transmisi yang bersambung. Oleh karena itu, perkembangan panjang atau kelengkapan sanad tidak dapat digunakan secara otomatis sebagai indikator kronologi tanpa mempertimbangkan karakteristik riwayat dan bukti pendukungnya. Motzki juga mengkritik generalisasi Schacht mengenai *spread of isnād* karena sejumlah contoh yang digunakan belum cukup untuk membuktikan bahwa setiap penambahan jalur transmisi merupakan hasil pemalsuan. Kritik tersebut menunjukkan bahwa variasi struktur sanad dapat memiliki penjelasan historis yang berbeda dan tidak selalu berasal dari proses pembentukan sanad secara artifisial. Dengan demikian, kaidah yang dirumuskan berdasarkan

sejumlah kasus memerlukan pengujian lebih lanjut sebelum diterapkan pada keseluruhan tradisi periwayatan hadis.

G. H. A. Juynboll kemudian mengembangkan teori *common link* Schacht dengan memperkenalkan sejumlah konsep dan kriteria tambahan untuk menganalisis struktur sanad secara lebih terperinci. Beberapa konsep yang digunakan meliputi *partial common link*, *single strand*, *diving strand*, dan *spider*. Selain itu, Juynboll membedakan *real common link* dan *seeming common link* berdasarkan tingkat percabangan serta dukungan jaringan transmisi. Suatu *common link* dipandang memiliki dasar historis yang lebih kuat apabila didukung oleh beberapa *partial common link* yang masing-masing juga memiliki percabangan periwayatan. Sebaliknya, titik pertemuan yang hanya didukung oleh sejumlah jalur tunggal dinilai memiliki dasar historis yang lebih lemah. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa Juynboll menempatkan struktur percabangan dan kepadatan jaringan periwayatan sebagai unsur penting dalam menentukan tingkat keterpercayaan historis sanad (Juynboll, 1983; Motzki, 2005).

Dalam menafsirkan kedudukan *common link*, Juynboll memiliki kesamaan pandangan dengan Schacht, terutama mengenai hubungan antara titik pertemuan sanad dan periode awal kemunculan hadis. Menurut Juynboll, *common link* merupakan tokoh yang pertama kali membentuk atau menyebarkan suatu riwayat secara luas sehingga dapat dipandang sebagai asal mula hadis dalam bentuk yang terdokumentasikan. Ia berpendapat bahwa *real common link* umumnya baru dapat diidentifikasi pada generasi tabiin atau periode sesudahnya. Sementara itu, jalur tunggal yang menghubungkan *common link* dengan otoritas lebih awal, termasuk sahabat atau Nabi, dipandang tidak memiliki dasar historis yang cukup kuat. Dalam interpretasi ini, bagian sanad sebelum *common link* diperlakukan sebagai konstruksi yang berpotensi dibentuk untuk menghubungkan suatu riwayat dengan otoritas generasi sebelumnya. Dengan demikian, teori Juynboll menempatkan *common link* bukan hanya sebagai titik percabangan transmisi, tetapi juga sebagai indikator utama dalam menentukan periode dan atribusi awal suatu hadis (Motzki, 2005).

Perbedaan antara Schacht dan Juynboll terlihat lebih jelas dalam penilaian terhadap bagian sanad yang menghubungkan *common link* dengan penghimpun hadis (*mukharrij*). Schacht cenderung memandang bagian tersebut sebagai bagian sanad yang lebih dapat dipercaya secara historis. Sebaliknya, Juynboll membedakan jalur yang didukung oleh sejumlah *partial common link* atau simpul transmisi (*knots*) dari jalur yang hanya berbentuk rangkaian tunggal (*single strands*). Menurut Juynboll, bagian sanad yang memiliki percabangan dan dukungan dari beberapa jalur independen mempunyai dasar historis yang lebih kuat. Sementara itu, jalur tunggal yang tidak didukung jaringan transmisi tambahan dipandang mencurigakan dan berpotensi merupakan konstruksi yang muncul belakangan. Dengan demikian, Juynboll menerapkan kriteria keterpercayaan historis secara lebih ketat daripada Schacht, termasuk terhadap bagian sanad yang berada setelah *common link* hingga mencapai penyusun koleksi hadis (Motzki, 2005).

Juynboll juga mengembangkan analisis terhadap fenomena jalur sanad yang melewati *common link* dan langsung menghubungkan periwayat belakangan dengan otoritas yang lebih awal. Fenomena tersebut disebut *diving*, sedangkan jalurnya dikenal sebagai *diving strands*. Dalam interpretasi Juynboll, jalur semacam ini diduga dibentuk oleh penghimpun hadis atau informannya untuk memperkuat atribusi suatu riwayat kepada otoritas yang lebih tinggi. Juynboll mengajukan prinsip bahwa semakin jauh suatu jalur melewati *common link* menuju generasi yang lebih awal, semakin belakangan pula kemungkinan waktu pembentukan jalur tersebut. Berdasarkan prinsip itu, *diving strand* yang mencapai generasi tabiin dianggap lebih tua daripada jalur yang mencapai sahabat, sedangkan jalur yang secara langsung mencapai Nabi dipandang sebagai perkembangan paling belakangan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Juynboll menggunakan kedalaman penyandaran sebagai indikator relatif dalam memperkirakan kronologi pembentukan jalur sanad (Motzki, 2005).

Motzki mengajukan sejumlah kritik terhadap teori *common link* yang dikembangkan Juynboll. Kritik pertama berkaitan dengan anggapan bahwa *common link* merupakan pencipta awal suatu hadis dan bahwa jalur tunggal yang menghubungkannya dengan Nabi merupakan konstruksi yang dibuat oleh tokoh tersebut. Menurut Motzki (2005), kesimpulan tersebut merupakan generalisasi yang tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan struktur sanad. Ketidakmampuan analisis sanad untuk memastikan apakah *common link* benar-benar menerima riwayat dari informan sebelumnya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hubungan transmisi tersebut tidak pernah terjadi. Seorang periwayat tetap mungkin menerima suatu hadis dari gurunya, kemudian menyebarkannya secara lebih luas kepada sejumlah murid sehingga menghasilkan pola percabangan yang terlihat dalam jaringan sanad. Oleh karena itu, keberadaan *common link* tidak harus selalu diartikan sebagai bukti awal penciptaan hadis, tetapi dapat pula mencerminkan perkembangan aktivitas penghimpunan dan penyebaran riwayat.

Sebagai alternatif, Motzki menafsirkan *common link* sebagai penghimpun utama generasi awal (*first major collector*) atau penyebar pengetahuan secara profesional (*professional disseminator*), khususnya dalam proses transmisi hadis dan sunah pada masa awal Islam. Penafsiran tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian riwayat mengalami perubahan, penggabungan, atau bahkan pemalsuan oleh periwayat tertentu. Namun, kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap masing-masing kasus, bukan diasumsikan sebagai karakter umum seluruh *common link*. Demikian pula, keberadaan satu jalur sanad yang menghubungkan

common link dengan sumber sebelumnya tidak selalu berarti bahwa transmisi hanya berlangsung melalui satu jalur. Versi lain mungkin pernah beredar tetapi tidak terdokumentasikan, tidak diketahui oleh penghimpun tertentu, atau tidak dipertahankan dalam sumber yang masih tersedia. Selain itu, seorang periwayat mungkin hanya menyampaikan jalur yang paling dikenal atau dianggap paling terpercaya tanpa merasa perlu menghimpun seluruh variasi riwayat yang beredar. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa struktur sanad perlu dipahami dalam kaitannya dengan praktik pengajaran, penghimpunan, dan seleksi materi pada masa awal transmisi hadis (Motzki, 2005; Amin, 2005).

Kritik kedua Motzki berkaitan dengan pembedaan antara *real common link* dan *seeming common link* yang didasarkan pada jumlah percabangan sanad. Juynboll berasumsi bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang tokoh, semakin kuat pula dasar historis yang mendukung keberadaan hubungan transmisi tersebut. Motzki (2005) mengakui bahwa banyaknya jalur independen secara teoretis dapat memperkuat penilaian terhadap keterpercayaan suatu riwayat. Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi persoalan ketika sebagian besar jalur setelah *partial common link* tetap berbentuk jalur tunggal. Dalam sejumlah contoh yang digunakan Juynboll, simpul-simpul periwayatan memang muncul pada tingkatan tertentu, tetapi hubungan dari simpul tersebut menuju para penghimpun hadis tidak selalu didukung oleh percabangan tambahan. Apabila persyaratan jaringan transmisi yang berlapis diterapkan secara ketat, sejumlah riwayat yang digunakan sebagai dasar analisis justru berpotensi tidak memenuhi kriteria historisitas yang ditetapkan. Dengan demikian, Motzki mempertanyakan kesesuaian antara standar pembuktian yang diajukan Juynboll dan keterbatasan jaringan periwayatan yang dapat direkonstruksi dari sumber-sumber yang masih tersedia.

Kritik ketiga berkaitan dengan pandangan Juynboll bahwa *diving single strands* merupakan jalur yang sengaja dibentuk oleh penghimpun hadis atau informannya. Pandangan tersebut bertumpu pada penggunaan *argumentum e silentio*, terutama ketika suatu jalur sanad hanya ditemukan dalam koleksi hadis yang lebih belakangan, tetapi tidak tercantum dalam koleksi lebih awal yang secara hipotetis diperkirakan semestinya memuatnya. Sebagai contoh, sanad yang menyebut tokoh seperti Mālik, ‘Abd al-Razzāq, Ibn ‘Uyaynah, atau Shu‘bah dapat dianggap mencurigakan apabila baru ditemukan dalam karya penghimpun belakangan, seperti Ahmad ibn Hanbal atau Muslim, sementara sumber yang lebih awal tidak mencantumkannya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa koleksi terdahulu telah merekam secara lengkap materi yang disampaikan oleh para periwayat bersangkutan. Namun, Motzki (2005) mempertanyakan kelayakan asumsi tersebut, khususnya untuk tradisi periwayatan abad kedua dan ketiga Hijriah, karena proses pengajaran dan penghimpunan hadis tidak selalu menghasilkan dokumentasi yang menyeluruh.

Motzki mengemukakan tiga pertimbangan mengenai keterbatasan kelengkapan sumber awal. Pertama, materi yang disampaikan seorang guru kepada murid-muridnya dalam kegiatan pengajaran kemungkinan hanya merupakan sebagian dari keseluruhan riwayat yang diketahui atau dimilikinya. Kedua, materi pengajaran dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga murid yang belajar kepada guru yang sama pada periode berbeda belum tentu menerima kumpulan riwayat yang identik. Ketiga, koleksi hadis yang disusun dan ditransmisikan oleh para murid dapat mengalami proses seleksi, penyuntingan, penyusunan kembali, atau penyampaian yang tidak sepenuhnya lengkap. Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan suatu riwayat dalam koleksi awal tidak selalu membuktikan bahwa riwayat tersebut belum dikenal ketika koleksi itu disusun. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai pemalsuan *diving strands* memerlukan bukti tambahan yang tidak hanya bersandar pada ketidakhadiran jalur tertentu dalam sumber yang lebih tua (Motzki, 2005).

Pendekatan kedua dalam penanggalan berbasis sanad adalah rekonstruksi sumber berdasarkan jaringan periwayatan (*source reconstruction on the basis of isnāds*). Pendekatan ini dikembangkan antara lain oleh Fuat Sezgin melalui kajiannya terhadap *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* karya al-Bukhārī dan Harald Motzki melalui penelitiannya terhadap *al-Muṣannaḥ* karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī. Sezgin menggunakan pola penyandaran sanad untuk merekonstruksi sumber-sumber tertulis yang diduga digunakan oleh penyusun koleksi hadis. Metode tersebut dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, seluruh sanad dalam koleksi hadis disusun berdasarkan periwayat paling akhir yang menjadi informan langsung penghimpun. Kedua, jalur-jalur sanad dari informan yang sering disebutkan dibandingkan untuk mengidentifikasi keberadaan nama periwayat yang sama (*names in common*). Apabila tidak ditemukan nama yang sama pada jalur tertentu, informan langsung tersebut dipandang sebagai penulis sumber yang digunakan penghimpun. Sebaliknya, apabila beberapa jalur memiliki nama yang sama, periwayat bersama terakhir dalam rangkaian tersebut dianggap sebagai penulis sumber yang lebih awal, sedangkan tokoh-tokoh sesudahnya dipandang sebagai pihak yang mentransmisikan sumber tersebut. Namun, metode Sezgin menimbulkan perdebatan karena bertumpu pada asumsi bahwa transmisi hadis pada umumnya berlangsung melalui sumber tertulis dan bahwa nama-nama periwayat dalam sanad dapat dihubungkan dengan penulis atau penyampai teks tertulis tertentu. Asumsi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena keberadaan suatu nama dalam sanad tidak secara otomatis membuktikan kepengarangan sebuah dokumen tertulis (Motzki, 2005).

Berbeda dengan Sezgin, Motzki menempatkan kegiatan pengajaran sebagai salah satu mekanisme penting dalam proses transmisi hadis. Menurut pendekatan ini, seorang guru (*shaykh*) dapat menyampaikan materi periwayatan secara lisan berdasarkan hafalan atau catatan yang dimilikinya, sedangkan para murid menerima,

menghafalkan, dan mencatat materi tersebut. Oleh karena itu, rekonstruksi sumber tidak selalu harus diarahkan pada identifikasi kitab tertulis yang digunakan oleh seorang penghimpun hadis. Dalam penelitiannya terhadap *al-Muṣannaf* karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī, yang dikembangkan melalui *Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz*, Motzki menelusuri sumber-sumber terdahulu berdasarkan jaringan sanad yang terdapat dalam koleksi tersebut. Analisisnya mengidentifikasi sejumlah informan utama ‘Abd al-Razzāq, yaitu Ma‘mar ibn Rāshid, Ibn Jurayj, Sufyān al-Thawrī, dan Ibn ‘Uyaynah. Meskipun sebagian tokoh tersebut diketahui memiliki hubungan dengan tradisi penghimpunan materi tertulis, keberadaan kitab-kitab yang mungkin mereka susun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ‘Abd al-Razzāq memperoleh seluruh riwayat secara langsung dari dokumen tersebut. Motzki menganggap bahwa penerimaan materi melalui kegiatan pengajaran merupakan penjelasan historis yang dapat dipertimbangkan. Namun, penentuan apakah ‘Abd al-Razzāq mencatat materi secara verbatim atau melalui pencatatan ringkas tetap memerlukan pemeriksaan tekstual dan perbandingan dengan riwayat yang disampaikan oleh murid lain dari informan yang sama (Motzki, 2005).

Untuk menilai keandalan penyandaran hadis oleh ‘Abd al-Razzāq kepada para informannya, Motzki mengembangkan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi nama-nama periwayat, tetapi juga memeriksa karakteristik dan pola transmisi masing-masing sumber. Prosedur pertama dilakukan melalui penyusunan profil individual (*individual profiles*) terhadap para informan utama. Profil tersebut mencakup jumlah informan utama dan informan tambahan, distribusi kuantitatif riwayat yang disandarkan kepada masing-masing sumber, jumlah periwayat yang jarang disebutkan, proporsi pendapat pribadi yang diriwayatkan, serta keberadaan riwayat anonim. Perbandingan antarprofil digunakan untuk menilai apakah distribusi materi menunjukkan pola yang konsisten dengan aktivitas transmisi yang berlangsung secara historis atau justru mengindikasikan kemungkinan penyandaran yang direkayasa. Dalam kasus *al-Muṣannaf*, Motzki menilai bahwa pola distribusi sumber yang ditemukan tidak mendukung dugaan bahwa ‘Abd al-Razzāq secara sewenang-wenang menciptakan seluruh atribusi periwayatannya. Dengan demikian, profil individual berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menguji keteraturan dan keragaman karakteristik transmisi berdasarkan data yang terdapat dalam koleksi hadis (Motzki, 2005).

Prosedur kedua dilakukan dengan mengidentifikasi ketidakteraturan atau kejanggalan dalam cara penghimpun hadis merujuk kepada informannya. Kejanggalan tersebut dapat berupa ungkapan ketidaktahuan mengenai identitas sumber, keraguan terhadap ketepatan redaksi, penyampaian riwayat secara tidak langsung dari informan utama, komentar kritis terhadap materi yang diterima, atau pencantuman beberapa varian riwayat dari sumber yang sama maupun berbeda. Menurut Motzki (2005), keberadaan karakteristik tersebut dapat menjadi petunjuk penting dalam menilai apakah suatu penghimpun hadis menyampaikan materi berdasarkan proses penerimaan yang nyata atau sekadar merekayasa atribusi sumber. Dalam kasus ‘Abd al-Razzāq, berbagai bentuk ketidakteraturan tersebut ditemukan dalam materi periwayatannya. Motzki memandang bahwa keberadaan unsur-unsur demikian sulit dijelaskan apabila seluruh penyandaran dilakukan melalui rekayasa yang disengaja, sebab penghimpun yang bermaksud menciptakan kesan autentisitas justru dapat memilih bentuk transmisi yang lebih seragam dan meyakinkan. Meskipun demikian, kejanggalan dalam penyandaran tetap merupakan indikator yang memerlukan interpretasi, bukan bukti tunggal yang secara otomatis memastikan autentisitas seluruh riwayat.

Kedua prosedur tersebut kemudian diterapkan Motzki terhadap sumber-sumber utama ‘Abd al-Razzāq, khususnya Ibn Jurayj, Ma‘mar ibn Rāshid, Sufyān al-Thawrī, dan Ibn ‘Uyaynah. Melalui pemeriksaan profil individual dan pola penyandaran, Motzki berupaya menilai keterpercayaan transmisi pada lebih dari satu tingkat generasi periwayatan. Pengujian lebih terperinci dilakukan terhadap materi yang diriwayatkan ‘Abd al-Razzāq dari Ibn Jurayj. Analisis tersebut memperlihatkan perbedaan karakteristik riwayat berdasarkan sumber yang dirujuk, antara lain dalam jenis materi yang disampaikan, kecenderungan penggunaan sanad keluarga, pemilihan informan utama atau otoritas lokal, serta tingkat otoritas yang menjadi tujuan penyandaran, seperti tabiīn, sahabat, dan Nabi. Perbedaan juga ditemukan dalam kualitas sanad, rumusan transmisi (*ṣiḡhat al-isnād*), serta bentuk penyajian hadis, seperti pernyataan dan dialog. Variasi tersebut menunjukkan bahwa materi dari sumber yang berbeda memiliki karakteristik yang dapat dibedakan melalui analisis internal. Dalam interpretasi Motzki, pola demikian memperkuat kemungkinan bahwa atribusi sumber dalam *al-Muṣannaf* mencerminkan jaringan transmisi yang nyata dan tidak semata-mata merupakan konstruksi penyusunnya (Motzki, 2005).

Berdasarkan analisis terhadap jaringan sanad dan karakteristik materi tersebut, Motzki berupaya merekonstruksi sumber-sumber hadis yang berasal dari generasi sebelum ‘Abd al-Razzāq. Rekonstruksi ini tidak hanya memungkinkan penelusuran materi kepada Ibn Jurayj, yang aktif pada abad kedua Hijriah, tetapi juga kepada sejumlah informan yang lebih awal, seperti ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ (w. 115 H/733 M) dan ‘Amr ibn Dīnār (w. 126 H/744 M). Melalui pendekatan tersebut, materi pengajaran yang dinisbatkan kepada para informan awal dapat direkonstruksi secara terbatas berdasarkan distribusi sanad dan pola penyampaian yang terdokumentasikan dalam koleksi hadis berikutnya. Namun, rekonstruksi tersebut tidak berarti bahwa bentuk asli seluruh riwayat dapat dipastikan secara lengkap. Ketepatan reproduksi materi oleh seorang murid tetap memerlukan pengujian terhadap karakteristik formal transmisinya serta perbandingan dengan riwayat yang diterima murid lain dari sumber yang sama. Dengan demikian, hasil rekonstruksi memberikan dasar untuk memperkirakan asal-usul dan perkembangan materi hadis, tetapi derajat kepastiannya bergantung pada kelengkapan dan keragaman bukti yang

tersedia (Motzki, 2005).

Motzki menegaskan bahwa pemeriksaan sanad perlu dilengkapi dengan analisis perbandingan matan untuk memperoleh penilaian historis yang lebih kuat. Analisis sanad dapat mengidentifikasi hubungan antarpriwayat, distribusi sumber, serta karakteristik jaringan transmisi, tetapi tidak selalu mampu memastikan ketepatan redaksi atau perubahan isi suatu hadis. Sebaliknya, perbandingan varian matan dapat menunjukkan persamaan, perbedaan, penambahan, atau perubahan tekstual yang terjadi dalam proses periwayatan. Keterkaitan antara kedua bentuk analisis tersebut memungkinkan peneliti mengevaluasi apakah variasi teks memiliki hubungan yang dapat dijelaskan melalui struktur transmisi. Namun, penerapannya tetap menghadapi keterbatasan ketika varian substansial suatu riwayat tidak tersedia atau sumber-sumber yang dapat dibandingkan terlalu sedikit. Dalam kondisi demikian, kesimpulan historis sering kali harus didasarkan pada informasi sanad dengan derajat kepastian yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pendekatan Motzki memperlihatkan bahwa rekonstruksi sumber berdasarkan sanad dapat menghasilkan petunjuk historis yang penting, tetapi penilaian autentisitas yang lebih meyakinkan memerlukan integrasi antara analisis sanad, perbandingan matan, dan evaluasi kritis terhadap konteks transmisi hadis (Motzki, 2005).

4. Penanggalan Berbasis Sanad dan Matan

Berbeda dengan metode penanggalan sebelumnya yang lebih menitikberatkan analisis pada matan, sebagaimana dikembangkan oleh Goldziher, Schacht, dan Speight, atau pada sanad, sebagaimana diterapkan oleh Schacht, Juynboll, Sezgin, dan Motzki, metode penanggalan keempat mengintegrasikan analisis kedua unsur tersebut untuk merekonstruksi sejarah periwayatan hadis. Pendekatan ini telah dirintis oleh Johannes Hendrik Kramers melalui artikelnya yang berjudul *Une tradition à tendance manichéenne* pada 1953 dan dilanjutkan oleh Josef van Ess melalui *Zwischen Hadīth und Theologie* pada 1975. Sejumlah sarjana lain, seperti Lawrence I. Conrad, Maher Jarrar, dan Uri Rubin, juga mengembangkan kajian yang memanfaatkan hubungan antara sanad dan matan dalam penelitian historis hadis (Motzki, 2004, hlm. xlvii; 2005, hlm. 250). Namun, pengembangan metode ini secara lebih sistematis terutama dilakukan oleh Gregor Schoeler dan Harald Motzki. Keduanya mengembangkan pendekatan tersebut secara independen dalam periode yang relatif bersamaan dan menggunakan istilah *isnād-cum-matn analysis* atau *matn-cum-isnād analysis* untuk menjelaskan metode yang menghubungkan perbandingan jalur transmisi dengan variasi tekstual hadis (Schoeler, 2011, hlm. 146; Motzki, 2005, hlm. 250). Dalam pembahasan selanjutnya, metode ini disebut *isnād-cum-matn analysis* (ICMA).

Dibandingkan dengan pendekatan penanggalan yang hanya menekankan salah satu unsur hadis, ICMA memiliki sejumlah keunggulan metodologis. Motzki (2004, hlm. xlix) mengidentifikasi empat kegunaan utama pendekatan tersebut. Pertama, ICMA memungkinkan penentuan kronologi hadis yang lebih cermat (*more precise dating*) melalui pemeriksaan hubungan antara jalur transmisi dan karakteristik teks. Kedua, metode ini dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah periwayatan suatu hadis (*reconstruction of the transmission history of a hadith*) berdasarkan perkembangan dan percabangan sanad. Ketiga, ICMA memungkinkan peneliti mengidentifikasi perubahan redaksi hadis selama proses transmisi (*changes of its text in the course of transmission*). Keempat, pendekatan tersebut dapat membantu mengevaluasi keterpercayaan periwayat (*reliability of transmitters*) dengan membandingkan karakteristik tekstual riwayat yang disampaikan melalui jalur berbeda. Keempat kegunaan tersebut menunjukkan bahwa ICMA tidak hanya diarahkan untuk memperkirakan waktu kemunculan suatu hadis, tetapi juga untuk menjelaskan proses perkembangan teks serta hubungan historis antara para periwayatnya.

Landasan metodologis ICMA bertumpu pada asumsi mengenai keberadaan korelasi antara variasi sanad dan variasi matan dalam transmisi suatu hadis. Menurut Motzki (2005, hlm. 251), perbedaan redaksi yang memiliki pola keterkaitan dengan percabangan jalur periwayatan dapat memberikan petunjuk mengenai proses penyampaian dan perubahan teks sepanjang sejarah transmisinya. Dalam kerangka tersebut, korelasi yang konsisten antara kelompok sanad dan kelompok matan dipandang sulit dijelaskan semata-mata sebagai hasil pemalsuan sistematis karena akan mengandaikan keterlibatan banyak periwayat dalam pembentukan variasi yang saling berhubungan. Hubungan tersebut memungkinkan peneliti menguji hasil analisis sanad melalui perbandingan matan, sekaligus memeriksa hasil analisis matan berdasarkan struktur jaringan periwayatan. Pendekatan ini berbeda dari kecenderungan Schacht yang lebih mencurigai perkembangan variasi sanad sebagai indikasi pembentukan riwayat pada periode belakangan. Motzki justru memandang keragaman sanad dan matan sebagai fenomena transmisi yang perlu dianalisis sebelum ditentukan asal-usul historisnya. Dalam proses periwayatan, variasi redaksi dapat muncul melalui perbedaan hafalan, cara penyampaian, atau perubahan bentuk ungkapan tanpa selalu menghilangkan kesamaan substansi hadis. Namun, keberadaan variasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan autentisitas riwayat. Nilai pembuktiannya terletak pada pola korelasi yang dapat diperiksa secara sistematis antara bukti sanad dan matan.

Penerapan ICMA dilakukan melalui lima tahapan analisis yang saling berkaitan. Pertama, peneliti menghimpun seluruh varian hadis yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber periwayatan yang tersedia (*compilation of variants*). Kedua, peneliti menyusun seluruh jalur sanad ke dalam diagram atau bundel transmisi

untuk mengidentifikasi pola percabangan serta menentukan keberadaan *common link* dan *partial common link*. Pada tahap awal, *common link* diperlakukan secara sementara sebagai penghimpun dan penyebar hadis profesional (*collector and professional disseminator*) yang kedudukannya masih memerlukan pengujian. Ketiga, peneliti menganalisis variasi matan dengan menyusun perbandingan sinoptik terhadap teks-teks yang berasal dari jalur periwayatan berbeda. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan perkembangan redaksi yang dapat memberikan petunjuk mengenai hubungan antarteks. Keempat, peneliti membandingkan kelompok varian matan dengan kelompok varian sanad untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara karakteristik tekstual dan struktur transmisi. Kelima, apabila korelasi tersebut dapat ditunjukkan, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai bentuk matan yang dapat direkonstruksi pada tingkat *common link* serta kemungkinan pihak yang bertanggung jawab atas perubahan redaksi selama proses periwayatan berikutnya (Motzki, 2005, hlm. 251; 2000, hlm. 174–175). Kelima tahapan tersebut memperlihatkan bahwa kesimpulan ICMA dibangun melalui pemeriksaan silang antara distribusi sanad dan perkembangan matan, bukan berdasarkan salah satu unsur secara terpisah.

Meskipun menawarkan perangkat analisis yang lebih terintegrasi, ICMA tetap menghadapi sejumlah keterbatasan metodologis dan epistemologis. Keterbatasan pertama berkaitan dengan asumsi bahwa korelasi antara variasi sanad dan matan dapat digunakan sebagai indikator historis transmisi hadis. Korelasi tersebut memang dapat memberikan petunjuk mengenai hubungan antarriwayat, tetapi tidak selalu membuktikan bahwa suatu hadis benar-benar berasal dari tokoh yang diidentifikasi sebagai *common link*. Hubungan antara variasi sanad dan matan masih mungkin terbentuk melalui proses transmisi yang kompleks, penyederhanaan riwayat, atau perkembangan tradisi secara kolektif. Keterbatasan kedua berkaitan dengan penentuan kedudukan *common link*. Tokoh yang menempati posisi tersebut tidak selalu merupakan sumber pertama suatu hadis, tetapi dapat menjadi periwayat paling awal yang terdokumentasikan secara luas dalam jaringan transmisi yang masih tersedia. Oleh karena itu, *common link* lebih tepat diperlakukan sebagai indikator titik penyebaran riwayat yang dapat diidentifikasi secara historis, bukan sebagai bukti mutlak mengenai pencipta atau sumber awal hadis. Kedua persoalan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi terhadap korelasi sanad dan matan memerlukan kehati-hatian agar kesimpulan historis tidak melampaui bukti yang tersedia.

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan kelengkapan sumber yang digunakan dalam analisis. Rekonstruksi sejarah periwayatan melalui ICMA akan menghasilkan gambaran yang lebih kuat apabila peneliti dapat menghimpun varian sanad dan matan dalam jumlah yang memadai. Namun, tidak seluruh jalur transmisi terdokumentasikan dalam literatur yang masih bertahan. Hilangnya sebagian tradisi lisan, manuskrip, atau koleksi hadis awal menyebabkan rekonstruksi historis harus dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Keterbatasan keempat berkaitan dengan karakteristik hadis yang diteliti. ICMA relatif lebih efektif diterapkan pada hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan dan variasi matan karena hubungan antara struktur sanad dan perbedaan tekstual dapat diperiksa secara lebih luas. Sebaliknya, penerapan metode ini pada hadis dengan jalur transmisi terbatas, termasuk hadis *gharib*, menghadapi kendala dalam mengidentifikasi korelasi yang diperlukan untuk menghasilkan rekonstruksi historis yang meyakinkan. Keterbatasan kelima berkaitan dengan sifat kesimpulan dalam penelitian sejarah. Hasil analisis ICMA merupakan rekonstruksi probabilistik yang dibangun berdasarkan bukti yang dapat diperiksa, bukan kepastian historis yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan tetap terbuka terhadap pengujian dan revisi apabila ditemukan sumber baru atau dikembangkan analisis yang lebih komprehensif.

Meskipun memiliki sejumlah keterbatasan, ICMA memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan metode penanggalan hadis melalui pengintegrasian analisis sanad dan matan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan verifikasi silang terhadap pola transmisi dan variasi tekstual sehingga rekonstruksi sejarah periwayatan tidak hanya bertumpu pada struktur sanad atau kandungan matan secara terpisah. Kekuatan metodologisnya terletak pada kemampuan menghubungkan distribusi jaringan periwayatan dengan perkembangan redaksi hadis, sedangkan keterbatasannya berkaitan dengan kelengkapan sumber, validitas asumsi analitis, dan tingkat kepastian kesimpulan historis. Dengan demikian, ICMA dapat dipahami sebagai pengembangan metodologis yang memperluas perangkat penelitian autentisitas hadis, tanpa menghilangkan kebutuhan terhadap evaluasi kritis atas bukti dan prosedur yang digunakannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penanggalan dan rekonstruksi sejarah hadis akan memperoleh landasan argumentatif yang lebih kuat ketika analisis sanad dan matan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan proporsional.

Analisis Perbandingan Metode Autentikasi Hadis Klasik dan Barat

Perbandingan antara metode autentikasi dalam tradisi 'ulūm al-ḥadīth dan pendekatan sejarah kritis menunjukkan bahwa keduanya dibangun di atas paradigma epistemologis yang berbeda. Tradisi klasik berangkat dari kepentingan normatif untuk menjaga otoritas Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, sedangkan kesarjanaan Barat berangkat dari kepentingan historis untuk merekonstruksi perkembangan tradisi hadis secara empiris. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan standar autentikasi yang digunakan juga berbeda.

Metode klasik memiliki keunggulan pada sistem kritik internal yang sangat sistematis. Melalui ilmu sanad, al-jarh wa al-ta'dīl, serta kritik terhadap matan, para ulama berhasil membangun mekanisme seleksi riwayat yang sangat rinci dan konsisten sehingga mampu membendung penyebaran hadis-hadis palsu dalam tradisi Islam. Kekuatan utama metode ini terletak pada evaluasi terhadap integritas periwayat dan kesinambungan transmisi.

Namun demikian, metode tersebut relatif kurang memberikan perhatian terhadap verifikasi historis eksternal. Beberapa asumsi epistemologisnya—seperti keadilan seluruh sahabat, reliabilitas mutlak literatur biografi periwayat, dan dominasi kritik sanad—menjadi sasaran kritik karena tidak selalu dapat diverifikasi melalui pendekatan sejarah.

Sebaliknya, pendekatan sejarah kritis menawarkan perangkat analisis yang lebih luas melalui source criticism, dating, common link analysis, hingga isnād-cum-matn analysis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti merekonstruksi perkembangan suatu hadis secara historis, mengidentifikasi perubahan teks selama proses transmisi, serta memperkirakan waktu dan lingkungan kemunculan suatu riwayat.

Akan tetapi, kekuatan tersebut juga disertai sejumlah kelemahan. Sebagian metode dating generasi awal, terutama yang dikembangkan Goldziher dan Schacht, dibangun di atas premis-premis yang bersifat hipotetis dan sering melakukan generalisasi berdasarkan data yang terbatas. Bahkan ICMA yang relatif lebih maju pun tetap menghasilkan kesimpulan yang bersifat probabilistik sehingga tidak dapat dipandang sebagai bukti historis yang final.

Dengan demikian, kedua pendekatan sesungguhnya tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. 'Ulūm al-ḥadīth unggul dalam evaluasi normatif terhadap validitas transmisi, sedangkan pendekatan sejarah kritis unggul dalam rekonstruksi historis perkembangan tradisi hadis.

Menuju Pendekatan Integratif

1. Prinsip Dasar Pendekatan Integratif

Analisis terhadap metode autentikasi hadis dalam tradisi 'ulūm al-ḥadīth maupun keserjanaan Barat menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan metodologis. Tradisi 'ulūm al-ḥadīth unggul dalam membangun sistem kritik internal yang sistematis melalui analisis sanad, evaluasi kredibilitas periwayat, dan kritik matan, tetapi relatif terbatas dalam melakukan verifikasi historis eksternal. Sebaliknya, pendekatan sejarah kritis menawarkan perangkat analisis yang kuat untuk merekonstruksi perkembangan historis suatu riwayat, namun tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kritik sanad yang telah berkembang dalam tradisi ilmu hadis.

Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut tidak semestinya diposisikan sebagai dua paradigma yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua perangkat metodologis yang dapat bekerja secara komplementer. Integrasi keduanya memungkinkan penelitian hadis memperoleh penilaian yang lebih utuh, baik dari sisi validitas transmisi maupun dari sisi historisitas perkembangan riwayat.

Atas dasar itu, pendekatan integratif yang diusulkan dalam tulisan ini dibangun di atas prinsip dual verification (verifikasi ganda), yaitu bahwa autentikasi hadis dilakukan melalui dua jalur verifikasi yang saling melengkapi.

Pertama, verifikasi internal, yaitu pengujian berdasarkan perangkat 'ulūm al-ḥadīth. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kesinambungan sanad (ittiṣāl al-sanad), kualitas moral dan intelektual para periwayat ('adālah dan ḍabt), kemungkinan adanya shudhūdh maupun 'illah, serta pengujian terhadap matan sesuai dengan kaidah kritik hadis klasik. Tujuan tahap ini adalah menentukan validitas transmisi hadis menurut standar epistemologi ilmu hadis.

Kedua, verifikasi eksternal, yaitu pengujian melalui pendekatan sejarah kritis (historical-critical method). Verifikasi ini meliputi dating untuk memperkirakan waktu kemunculan riwayat, analisis konteks sejarah (historical contextualization) guna menilai kesesuaiannya dengan realitas sosial dan politik pada masa tersebut, korroborasi (corroboration) dengan sumber-sumber sejarah lain yang independen, serta rekonstruksi proses transmisi melalui perangkat common link analysis dan isnād-cum-matn analysis (ICMA). Tahap ini bertujuan menilai plausibilitas historis suatu riwayat beserta dinamika perkembangannya.

Prinsip dual verification tersebut memungkinkan setiap hadis memperoleh dua bentuk validasi sekaligus, yaitu validitas normatif melalui kritik hadis klasik dan plausibilitas historis melalui kritik sejarah. Dengan demikian, autentikasi hadis tidak hanya diarahkan pada penetapan status sahih atau tidak sahih, tetapi juga pada pemahaman yang lebih utuh mengenai proses kemunculan, perkembangan, dan transmisi hadis dalam sejarah Islam.

2. Model Operasional Pendekatan Integratif

Berdasarkan prinsip *dual verification* di atas, pendekatan integratif dalam penelitian hadis dapat dioperasionalkan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah verifikasi internal (*internal*

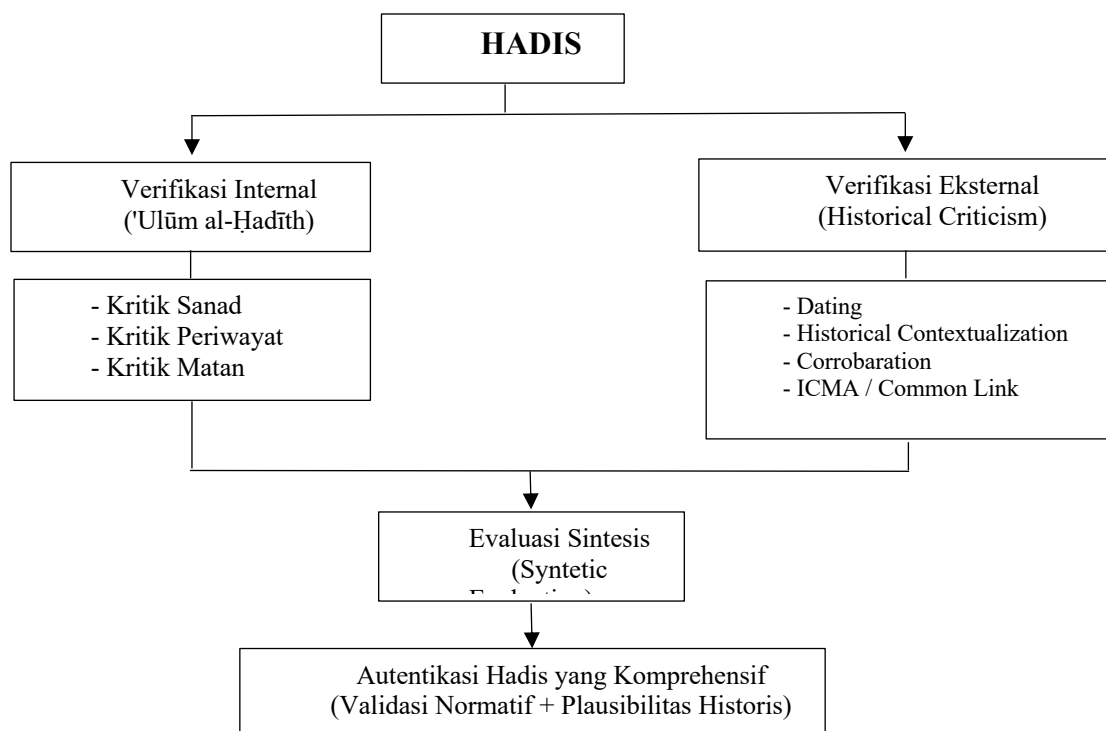
verification), yaitu analisis terhadap sanad, periwayat, dan matan dengan menggunakan perangkat '*ulūm al-ḥadīth*. Tahap ini bertujuan menilai kualitas transmisi riwayat berdasarkan standar yang telah dikembangkan dalam tradisi ilmu hadis.

Tahap kedua adalah verifikasi eksternal (*external verification*), yaitu pengujian historis terhadap riwayat yang sama melalui metode sejarah kritis. Analisis dilakukan terhadap kemungkinan waktu kemunculan hadis (*dating*), konteks sosial-historis yang melatarbelakanginya, kesesuaiannya dengan sumber-sumber sejarah lain melalui korroborasi, serta rekonstruksi perkembangan sanad dan matan menggunakan *common link analysis* maupun *isnād-cum-matn analysis*.

Tahap ketiga merupakan evaluasi sintesis (*synthetic evaluation*), yaitu proses mempertemukan hasil verifikasi internal dan eksternal dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Pada tahap ini tidak dilakukan subordinasi salah satu pendekatan terhadap pendekatan lainnya, melainkan dialog metodologis untuk memperoleh penilaian yang lebih komprehensif mengenai autentisitas suatu hadis.

Apabila hasil kedua jalur verifikasi saling menguatkan, maka tingkat kepercayaan terhadap hadis tersebut menjadi semakin tinggi karena memperoleh legitimasi normatif sekaligus dukungan historis. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan di antara keduanya, maka perbedaan tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menolak ataupun menerima hadis, tetapi dipahami sebagai petunjuk adanya persoalan historis yang memerlukan penelitian lebih lanjut, seperti kemungkinan perkembangan redaksi, transformasi fungsi hadis, atau dinamika proses transmisinya.

Model operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Keunggulan Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif yang dibangun di atas prinsip *Dual Verification* menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan secara terpisah. *Pertama*, pendekatan ini mampu memanfaatkan keunggulan masing-masing tradisi sekaligus mengurangi keterbatasannya. '*Ulūm al-ḥadīth* memberikan perangkat kritik internal yang rinci terhadap sanad, periwayat, dan matan, sedangkan pendekatan sejarah kritis memberikan verifikasi historis terhadap proses kemunculan dan perkembangan suatu riwayat. *Kedua*, pendekatan ini menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap hadis. Penelitian tidak hanya berhenti pada penetapan status kesahihan menurut standar klasik, tetapi juga menjelaskan bagaimana hadis berkembang dalam sejarah transmisinya, konteks sosial yang melatarbelakanginya, serta kemungkinan perubahan yang terjadi selama proses periwayatan.

Ketiga, pendekatan integratif meningkatkan kualitas argumentasi akademik karena setiap kesimpulan dibangun melalui dua jalur verifikasi yang saling melengkapi. Hadis yang memperoleh dukungan baik dari verifikasi internal maupun eksternal memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat, sedangkan adanya perbedaan hasil antara kedua jalur justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menjelaskan faktor-faktor yang

melatarbelakanginya. *Keempat*, pendekatan ini menyediakan kerangka metodologis yang lebih sistematis bagi penelitian hadis kontemporer. Hubungan antara *'ulūm al-ḥadīth* dan metode sejarah tidak lagi dipahami secara dikotomis, tetapi ditempatkan dalam satu alur penelitian yang berurutan melalui verifikasi internal, verifikasi eksternal, dan evaluasi sintesis.

Dengan demikian, pendekatan integratif diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif metodologis dalam pengembangan studi hadis kontemporer, karena mampu memadukan ketelitian kritik hadis klasik dengan keluasan analisis sejarah modern dalam satu kerangka penelitian yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa metode autentikasi hadis dalam tradisi *'ulūm al-ḥadīth* dan kesarjanaan Barat berkembang di atas paradigma epistemologis yang berbeda sehingga masing-masing memiliki orientasi, kekuatan, dan keterbatasan metodologis yang berbeda pula. Tradisi *'ulūm al-ḥadīth* berhasil membangun sistem kritik internal yang sangat sistematis melalui analisis sanad, evaluasi kredibilitas periwayat, dan kritik matan sehingga efektif dalam menjaga validitas transmisi hadis. Namun demikian, pendekatan ini relatif terbatas dalam memberikan verifikasi historis eksternal terhadap proses kemunculan dan perkembangan suatu riwayat.

Sebaliknya, pendekatan sejarah kritis menawarkan seperangkat instrumen yang memungkinkan rekonstruksi historis terhadap tradisi hadis melalui *source criticism*, *dating*, *common link analysis*, dan *isnād-cum-matn analysis* (ICMA). Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan historisitas dan dinamika perkembangan hadis, meskipun sebagian asumsi metodologisnya masih diperdebatkan dan hasil rekonstruksinya pada hakikatnya bersifat probabilistik.

Analisis komparatif terhadap kedua tradisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara *'ulūm al-ḥadīth* dan pendekatan sejarah kritis tidak harus dipahami secara dikotomis ataupun saling menegasikan. Sebaliknya, keduanya dapat ditempatkan sebagai dua perangkat metodologis yang saling melengkapi dalam proses autentikasi hadis.

Atas dasar itu, tulisan ini menawarkan suatu pendekatan integratif yang dibangun di atas prinsip *dual verification*, yaitu penggabungan verifikasi internal melalui perangkat *'ulūm al-ḥadīth* dengan verifikasi eksternal melalui metode sejarah kritis. Dalam kerangka ini, autentikasi hadis dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu verifikasi internal, verifikasi eksternal, dan evaluasi sintesis (*synthetic evaluation*), sehingga penilaian terhadap suatu hadis tidak hanya mempertimbangkan validitas normatif transmisi, tetapi juga plausibilitas historis perkembangan riwayatnya.

Dengan demikian, autentikasi hadis tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses penetapan status sahih atau tidak sahih berdasarkan satu pendekatan tertentu, melainkan sebagai proses verifikasi ilmiah yang memadukan ketelitian kritik hadis klasik dengan keluasan analisis sejarah modern. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memperkaya metodologi penelitian hadis kontemporer sekaligus membuka ruang dialog akademik yang lebih konstruktif antara tradisi keilmuan Islam dan studi hadis modern.

Daftar Pustaka

- Amh}azu>n, Muh}ammad. *Tah}qi>q Mawa>qif Al-S{ah}a>bah Fi> Al-Fitnah Min Riwa>ya>t Al-Ima>m Al-T{abari> Wa Al-Muh}addithi>n*. Cet. ke-2. Kairo: Da>r al-Sala>m, 2007.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- . “The Reliability of the Traditional Science of H{adi>th: A Critical Reconsideration.” *Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies* 43, no. 2 (2005).
- . *Western Methods of Dating Vis-a-Vis Uhumul Hadis: Refleksi Metodologis Atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam Dan Barat (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makasar, 2010)*, n.d. <http://kamaruddinamin.uin-alauddin.ac.id/files/pidato.docx>.
- Andreas Görke. “Prospects and Limits in the Study of the Historical Muhammad.” In *The Transmission and Dynamic of the Textual Source of Islam: Essay in Honour of Harald Motzki*, edited by Nicolet Boekhoff-van der Voort, Kees Verteege, and Joas Wagemakers. Leiden: Brill, 2011.
- Bazmu>l, Ah}mad bin ‘Umar bin Sa>lim. *Al-Muqtarib Fi> Baya>n Al-Mud}t{arib*. Jeddah: Da>r al-Kharra>z, 2001.
- Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad’s Legacy in The Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publication, 2009.
- Bukha>ri>, Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-. “S{ah}i>h} Al-Bukha>ri>.” *Jawa>mi’ Al-Kalim* 4.5. islamweb.net, n.d.
- H{ajja>j, Muslim bin al-. “S{ah}i>h} Muslim.” *Jawa>mi’ Al-Kalim* 4.5. islamweb.net, n.d.
- H{anbal, Ah}mad bin. “Musnad Ah}mad Bin H{anbal.” *Jawa>mi’ al-Kalim* 4.5, n.d.
- Ibn al-S{ala>h}, Abu> ‘Amr ‘Uthma>n b. ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzu>ri> (dikenal: ‘Ulu>m Al-H{adi>th Li Ibn Al-S{ala>h}). Edited by Nu>r al-Di>n ‘Itr. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1986.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu*

- Sejarah*. Cet. ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jennifer Speake, and Mark LaFlaur. *The Oxford Essential Dictionary of Foreign Terms in English*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Juynboll, G.H.A. "(Re)Appraisal of Some Technical Terms in Ḥadīth Science." *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 303–49.
- . *Muslim Tradition: Studies In Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- . "Some Isna>d - Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman - Demeaning Saying from H{adi>th Literature." In *Studies on the Origins and Uses of Islamic H{adi>th*, 343–83. Aldershot: Variorum Ashgate Publishing Limited, 1996.
- Lange, John. "The Argument from Silence." *History and Theory* 5, no. 3 (1996).
- Motzki, Harald. "Dating Muslim Traditions: A Survey." *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204–53. <https://doi.org/10.1163/1570058053640349>.
- . "Introduction." In *Hadith: Origins and Developments*, edited by Harald Motzki. Aldershot: Ashgate/Variorum, 2004.
- . "The Murder of Ibn Abi> Al-H{uqayq: On the Origin an Reliability of Some Magha>zi> Reports." In *The Biography of Muh}ammad: The Issue of the Sources*, edited by Harald Motzki. Leiden, Boston and Köln: Brill, 2000.
- . *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical School*. Translated by Marion H. Katz. Leiden, Boston, Koln: Brill, 2002.
- . "The Prophet and the Cat: On Dating Malik's Muwatta' and Legal Traditions." *Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAL)* 22 (1998): 18–83.
- Motzki, Harald, Nicolet Boekhoff-van der Voort, and Sean W. Anthony. *Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Magha>zi> H{adi>th*. Leiden and Boston: Brill, 2010.
- Nasa>'i>, Ah}mad bin Shu'ayb al-. "Al-Sunan Al-Kubra> Li Al-Nasa>'i>." *Jawa>mi' Al-Kalim* 4.5. islamweb.net, n.d.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Schoeler, Gregor. *The Biography of Muhammad: Nature and Authenticity*. Translated by Uwe Vagelpohl. New York and London: Routledge, 2011.
- . *The Oral and the Written on Early Islam*. Translated by Uwe Vagelpohl. London and New York: Routledge, 2006.
- Sha>fi'i>, Abu> 'Abd Alla>h Muh}ammad b. Idri>s al-. *Al-Risa>lah*. Edited by Ah}mad Muh}ammad Sha>kir. Kairo: Mat}ba'ah Mus}tafa> al-Ba>bi> al-H{alabi> wa Awla>dihi, 1938.
- Suyu>t}i, Jala>l al-Di>n 'Abd al-Rah}ma>n b. Abi> Bakr al-. *Tadri>b Al-Ra>wi> Fi> Sharh} Taqri>b Al-Nawa>wi>*. Edited by Ma>zín b. Muh}ammad Al-Sarsa>wi. Vol. I. al-Damma>m: Da>r Ibn al-Jawzi, 1431.
- T{ah}h}a>n, Mah}mu>d al-. *Taysi>r Mus}t{ala>h Al-H{adi>th*. Cet. ke-9. Riya>d}: Maktabah al-Ma'a>rif, 1996.
- . *Taysi>r Mus}t{alah} Al-H{adi>th*. IX. Riyad}: Maktabah al-Ma'a>rif, 1996.